

Membangun Kemandirian untuk Menciptakan Keberlanjutan





Membangun Kemandirian untuk **Menciptakan Keberlanjutan**



Pandemi COVID-19 berdampak signifikan bagi industri perbankan. Kondisi ini memberikan tantangan yang cukup besar bagi industri Bank, tak terkecuali Bank Banten. Perseroan menyadari bahwa untuk menjawab tantangan ini diperlukan strategi yang komprehensif yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi tetapi juga aspek lingkungan dan sosial. Perseroan terus berkomitmen untuk mencapai kemandirian dalam rangka menciptakan keberlanjutan Bank secara optimal. Strategi-strategi keberlanjutan pun dijalankan dan diperkuat dalam setiap lini operasional Bank. Melalui program-program kemitraan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung keuangan berkelanjutan, Perseroan berkomitmen untuk keberlanjutan Bank dan menambah nilai bagi para pemangku kepentingan.

Daftar Isi

Penjelasan Tema		
Daftar Isi	1	
Kinerja Keberlanjutan 2020	2	
Highlights 2020	2	
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan	2	
Peristiwa Penting	4	
01	BANK BANTEN MEMBANGUN KEMANDIRIAN UNTUK MENCiptAKAN KEBERLANJUTAN	8
	Sambutan Direksi	10
	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020	15
02	TENTANG LAPORAN INI	20
03	PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	26
04	PROFIL BANK BANTEN	30
05	TATA KELOLA KEBERLANJUTAN	48
06	KINERJA EKONOMI KEBERLANJUTAN	60
07	KINERJA LINGKUNGAN	68
08	KINERJA SOSIAL	74
	Index Referensi Silang	86
	Lembar Umpan Balik	102

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN 2020

KINERJA EKONOMI

Aset Tahun 2020 tercatat sebesar

Rp **5.337.281** Juta
million

Jumlah kredit yang disalurkan
di tahun 2020 sebesar

Rp **3.789.819** Juta
million

Pengumpulan Dana Pihak Ketiga
mencapai

Rp **2.582.207** Juta
million

jumlah Perolehan pendapatan bunga
tahun 2020

Rp **372.209** Juta
million

KINERJA SOSIAL

Jumlah Karyawan Wanita sebesar **39,68%**
dari Total Karyawan Perseroan, mencerminkan Perseroan
menjamin kesetaraan gender dan *diversity* dalam
pengelolaan karyawannya.

KINERJA LINGKUNGAN

Penggunaan Listrik **turun 15%**
dari 2.892.770 kWh di tahun 2019 menjadi
2.459.307 kWh

Penggunaan air berkurang
30.214.764 m³ atau **16%**
dibanding tahun 2019 yang sebesar 189.418.699 m³

Perseroan berhasil melakukan penghematan kertas
sebanyak **436 rim** atau **41%**.
Penurunan kertas ini berkontribusi
terhadap penyelamatan pohon sebanyak 436 pohon

Zero Pengaduan Lingkungan,
membuktikan kehadiran Bank tidak merusak lingkungan.

Perseroan meraih **Zero Accident**
yang berarti Perseroan berhasil menerapkan K3
di lingkungan Bank dengan baik

Dana CSR yang disalurkan di tahun 2020 mencapai
Rp104,54 juta

PERISTIWA PENTING



Bank Banten Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Wilayah Banten

3 Januari 2020

Penyerahan bantuan Bank Banten berupa dana dan obat-obatan untuk para korban banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Banten, antara lain di Kota Tangerang dan Kabupaten Lebak



Bank Banten Tarik Undian Nasabah Program *Customer Reward Kredit Konsumer*

15 Januari 2020

Mengawali tahun 2020, Perseroan melakukan pengundian dan penyerahan hadiah Program *Customer Reward Kredit Konsumer* periode Oktober-Desember 2019 di Serang. Program tersebut merupakan bentuk apresiasi Bank Banten kepada para nasabah yang telah mempercayai Bank Banten sebagai Bank kebanggaan masyarakat Banten sekaligus dalam rangka memeriahkan HUT ke-19 Provinsi Banten



Bank Banten Kembali Pertahankan Peringkat Nasional Jangka Panjang

15 Januari 2020

Perseroan kembali mempertahankan Peringkat Utang Jangka Panjang pada level 'A(idn)'. Lembaga Pemeringkatan Internasional Fitch Ratings melalui Fitch Ratings Indonesia memberikan Peringkat Nasional Jangka Panjang Tujuh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. Fitch Rating Indonesia memandang bahwa sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Banten memberikan dampak terhadap pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi di daerah Banten. Hal ini bisa ditunjukkan dari pangsa pasar yang mencapai 25% dari total aset daerah.



Pedulih Bencana Banten, Bank Banten Hadirkan Program Banten Satu Rasa

24 Januari 2020

Penyerahan bantuan dari para pegawai Bank Banten yang tergerak untuk melakukan penggalangan bantuan untuk masyarakat Desa Mayak Kec. Curugbitung, Kab. Lebak yang terkena banjir bandang melalui program "Banten Satu Rasa". Bantuan yang diberikan berupa Sembilan Bahan Pokok (Sembako), Pakaian Seragam Sekolah Dasar (SD), serta Peralatan Ibadah berupa Al- Quran dan Sajadah



Gebyar Tabungan Bank Banten Berhadiah Perjalanan Religi

30 Januari 2020

Perseroan kembali melaksanakan pengundian Program Gebyar Tabungan Bank Banten yang berhadiah Perjalanan Religi. Sebuah program yang dihadirkan khusus sebagai bentuk apresiasi kepada para nasabah, yang telah mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada Bank Banten, sekaligus dalam rangka memeriahkan HUT ke-19 Provinsi Banten.



Perkuat Modal, Bank Banten Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

26 Februari 2020

Perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) guna meminta persetujuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED), Jakarta.



Bank Banten Lakukan Aksi Cepat Tanggap dalam Mencegah Penyebaran COVID-19

26 Maret 2020

Bank Banten bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan (DinKes) untuk menyalurkan bantuan berupa 95 set Alat Perlindungan Diri (APD) serta 500 unit *Viral Transport Medium* (VTM) kepada tenaga medis di RSUD Banten. Dengan penyaluran bantuan tersebut diharapkan para tenaga medis dapat mengurangi risiko terkena paparan langsung dengan COVID-19.



Bank Banten Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020

17 Juli 2020

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019. Laporan Tahunan menyajikan kinerja keuangan Perseroan tahun 2019 serta langkah strategis untuk melakukan penguatan permodalan, pembenahan proses bisnis dan layanan, pengembangan produk serta penguatan struktur organisasi dengan dukungan SDM yang profesional untuk mendukung perbaikan kinerja Perseroan.

PERISTIWA PENTING



Bank Banten Gelar *Public Expose* Tahunan dan Insidentil

29 September 2020

Perseroan menggelar *Public Expose* Tahunan dan Insidentil tahun 2020 guna memaparkan kinerja perusahaan selama triwulan II tahun 2020 serta beberapa rencana rangkaian Aksi Korporasi Perseroan, yaitu *Reverse Stock* dan PUT VI.



Bank Banten Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020

2 Oktober 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dilaksanakan guna meminta persetujuan Rapat atas. Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock*) dan penerbitan nominal saham baru Seri C melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMTED).



Dana Setoran Modal Mendapatkan Restu OJK, Bank Banten Siap Bersinergi Membangun Kemandirian dengan Pelayanan Terbaik

30 November 2020

Perseroan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Dana Setoran Modal dari Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development, dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Dana Setoran Modal tersebut merupakan konversi dari dana RKUD Provinsi Banten yang berada di Bank Banten melalui PT Banten Global Development berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten sebesar Rp1.551 triliun.



1 Desember 2020

Perseroan kembali meraih peringkat nasional jangka panjang di A(idn) dengan *outlook* stabil dari Fitch Ratings Indonesia. Adapun peringkat nasional di kategori 'A' menunjukkan ekspektasi akan risiko gagal bayar yang rendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya. Peringkat Bank Banten dari ekspektasi Fitch ini menjadi dukungan yang luar biasa, didorong oleh pentingnya proposisi bank pembangunan daerah bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Perseroan dipandang oleh Fitch memiliki pangsa pasar dari total aset perbankan di provinsi sekitar 2% pada akhir 9M20 dengan kecenderungan akan meningkat secara signifikan dalam jangka menengah.

PERISTIWA PENTING



Kick Off Business 2021, Bank Banten Siap Membangun Perekonomian Daerah Pasca Pandemi

7 Desember 2020

Perseroan melaksanakan webinar nasional dengan tema *Kick Off Business* Bank Banten 2021. Pada kesempatan tersebut, hadir Ekonom Senior yang juga merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri. Pertemuan yang dilakukan secara daring melalui *video conference* tersebut ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada segenap insan pengambil keputusan di Perseroan, khususnya dalam hal pemahaman perekonomian di tengah Pandemi COVID-19. Selain itu, kegiatan webinar tersebut juga dilakukan guna memberikan arah kebijakan strategis Perseroan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi fungsional Perseroan, mencakup upaya intermediasi dan strategi penciptaan nilai sebagai Bank Pembangunan Daerah.



Peroleh Surat Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK, Bank Banten Laksanakan PUT VI

8 Desember 2020

Perseroan menerima Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dengan No. S-286/D.04/2020 untuk melaksanakan PUT VI dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD). Perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 60.820.296.006 saham baru Seri C atas nama dengan nilai nominal Rp.50,- yang ditawarkan dengan harga Rp.50,- per saham.



Bursa Catat Saham Hasil Reverse Stock Bank Banten

10 Desember 2020

Bursa Efek Indonesia mencatatkan saham hasil *Reverse Stock* Perseroan. Dengan rasio nilai 10 : 1 (sepuluh banding satu), maka saham Seri A yang semula memiliki nilai nominal Rp100,- berubah menjadi Rp1.000,- dan saham Seri B yang semula memiliki nilai nominal Rp50,- berubah menjadi Rp500,-



01

> BANK BANTEN MEMBANGUN KEMANDIRIAN UNTUK MENCIPTAKAN KEBERLANJUTAN

Strategi Perseroan dalam melaksanakan keuangan berkelanjutan didasari dari semangat seluruh *stakeholder* untuk membangun Banten yang lebih baik dan menjadi Bank Kebanggaan Masyarakat Banten. Perseroan berupaya memberikan kinerja terbaik untuk menjadi “Bank Kebanggaan Masyarakat Banten” dengan berkontribusi terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan di wilayah Provinsi Banten.

SAMBUTAN DIREKSI

Perekonomian global 2020 diwarnai oleh pandemi COVID-19 yang menimbulkan dampak luar biasa (*extraordinary*) terhadap kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Upaya kesehatan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 telah menyebabkan terbatasnya mobilitas dan kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan dan gelombang pertumbuhan ekonomi yang kontraktif di dunia. Kondisi ini berdampak pada kinerja industri dan Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dapat mengatasi tantangan dan mencapai kinerja positif pada tahun 2020.



KEMAL IDRIS
Direktur



SAMBUTAN DIREKSI

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaan-Nya, di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, Perseroan dapat mengatasi tantangan dengan mencapai kinerja yang positif. Situasi pandemi COVID-19 menuntut kita semua untuk berubah dan beradaptasi, dengan tetap berkarya bagi sesama. Kami percaya bahwa pandemi ini bukanlah hambatan untuk menebarkan karya dan kebaikan, melainkan sebuah momentum untuk melangkah lebih jauh melalui inovasi-inovasi dan pelayanan terbaik bagi nasabah.

Akibat terjadinya pandemi COVID-19 ini, baik perekonomian nasional maupun perekonomian regional mengalami perlemahan. Secara nasional perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen selama tahun 2020. Sedangkan perekonomian Provinsi Banten juga mengalami kontraksi sebesar 3,38 persen atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya (5,29 persen). Bagi industri perbankan kondisi pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang signifikan. Pertumbuhan kredit perbankan tercatat kontraksi sebesar 2,41% pada Desember 2020 yang bersumber dari seluruh jenis penggunaan kredit, baik kredit modal kerja, investasi, maupun konsumsi. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) terus meningkat hingga triwulan III, meskipun kemudian sedikit melambat pada akhir 2020. DPK terus tumbuh tinggi hingga 12,88% (yoy) pada September 2020 namun sedikit melambat di Desember 2020 menjadi 11,11%. Namun demikian, di tengah perlambatan perekonomian dan menurunnya industri keuangan, Perseroan masih dapat mencatatkan kinerja yang positif.

Merespons Tantangan Keberlanjutan melalui Visi, Misi dan Strategi Keberlanjutan

Bagi Perseroan, kondisi tahun 2020 ini memberikan tantangan yang cukup besar. Dalam menghadapi tantangan ini, Perseroan tetap berusaha menjaga komitmennya untuk menjalankan inisiasi keberlanjutan

dengan mengelola aspek ekonomi dan aspek sosial dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, penyebaran wabah COVID-19 berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja debitur. Untuk meningkatkan stimulus perekonomian yang melemah dan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah, Perseroan mengeluarkan ketentuan restrukturisasi fasilitas kredit debitur Bank Banten yang terdampak penyebaran COVID-19. Ketentuan ini berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 perihal Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Dari aspek lingkungan, Perseroan merespons dengan menerapkan kebijakan-kebijakan efisiensi penggunaan kertas, air, dan listrik. Sedangkan dalam menghadapi tantangan sosial selama tahun 2020 ini, Perseroan berfokus kepada penanganan dampak sosial akibat pandemi COVID-19 khususnya bagi karyawan, nasabah, dan masyarakat khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank Banten.

Perseroan juga memiliki beberapa strategi prioritas baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Secara jangka pendek, Perseroan berfokus pada pengembangan kapasitas internal untuk membangun pemahaman (*awareness*) atas keuangan berkelanjutan bagi seluruh Insan Bank Banten. Secara jangka menengah dan panjang Perseroan berusaha untuk melakukan penyesuaian organisasi, kebijakan dan prosedur untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan dan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kriteria usaha berkelanjutan. Pengembangan produk ini sangat penting bagi Perseroan untuk dapat meningkatkan diversifikasi produk dan juga meningkatkan portofolio produk sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan *online* bagi nasabah sehingga Bank mengeluarkan layanan-layanan *digital* yang memudahkan nasabah. Kami meyakini bahwa strategi-strategi tersebut mendukung komitmen Perseroan dalam menjalankan keuangan berkelanjutan dan menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Bank.

Pencapaian Kinerja Keberlanjutan

Selama tahun 2020, Perseroan terus memberikan kinerja terbaiknya untuk melayani nasabah khususnya dan pemangku kepentingan pada umumnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan nasabah dan menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan. Untuk kinerja ekonomi, Perseroan mencatat rugi bersih sebesar 308.158 juta, meningkat 124,02% dibandingkan rugi bersih Bank tahun sebelumnya. Perseroan menghimpun Dana Pihak Ketiga sebesar Rp2,58 triliun menurun 53,76% dibandingkan tahun sebelumnya, dan dari dana tersebut penyaluran kredit adalah sebesar Rp3,79 triliun, menurun 29% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama tahun 2020, Perseroan menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp395.584 juta menurun 35,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari nilai ekonomi yang dihasilkan tersebut, sejumlah Rp359.078 juta didistribusikan kepada pemangku kepentingan, termasuk pegawai, pemerintah, pemegang saham, maupun masyarakat melalui penyaluran dana CSR. Nilai ekonomi yang didistribusikan oleh Bank mencapai 226,60% dari nilai ekonomi yang dihasilkan. Nilai ekonomi yang ditahan oleh Perseroan adalah sebesar minus Rp500.793 juta, meningkat 2,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam implementasi keuangan berkelanjutan, Perseroan memfokuskan pada penyaluran kredit kepada UMKM.

Perseroan terus berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Dari aspek lingkungan Bank Banten melakukan inisiasi penerapan kebijakan *green office* yang mengaplikasikan gaya hidup ramah lingkungan sebagai budaya. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja ramah lingkungan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Kebijakan *green office* juga menjadi bentuk kepedulian Perseroan terhadap pelestarian lingkungan. Upaya mewujudkan *green office* dilakukan oleh Perseroan, misalnya dengan efisiensi pemakaian kertas, listrik dan bahan bakar. Bank juga menggunakan material dan energi ramah lingkungan, seperti penggunaan lampu hemat energi (LED).

Sedangkan dari aspek sosial, Perseroan juga tetap fokus dan berkomitmen memberikan layanan prima di tengah kondisi Pandemi COVID-19 baik kepada nasabah maupun pekerja. Untuk nasabah, Bank Banten berupaya untuk terus meningkatkan kepuasan nasabah yang antara lain dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perseroan juga terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui penerapan pelayanan prima, termasuk dengan menyediakan produk-produk digital.

Selama masa pandemi, Perseroan mendorong transaksi non-tunai di masyarakat (*cashless society*) melalui pengembangan fitur *e-banking* dan frekuensi pengguna melalui jaringan *e-channel* memperlihatkan pertumbuhan. Inisiatif Perseroan mengembangkan produk digital membuahkan dampak signifikan pada pergeseran proporsi transaksi dari teller menjadi ke *e-channel*.

Sedangkan untuk karyawan, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi hak-hak normatif karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan itu, Perseroan juga melakukan program pengembangan kompetensi dan kapasitas karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan. Sepanjang tahun 2020, Perseroan tetap menyelenggarakan pengembangan kompetensi melalui webinar dan pelatihan secara virtual. Selain itu, Perseroan juga memperhatikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk menjadikan Perseroan sebagai tempat kerja pilihan bagi warga Banten dan sekitarnya.

Sementara bagi masyarakat, Perseroan menjalankan kegiatan CSR secara berkesinambungan dengan menyediakan anggaran yang cukup. Perseroan menetapkan dana CSR untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp104,54 juta. Dana CSR tersebut digunakan untuk memberikan dampak ekonomi tidak langsung kepada masyarakat secara signifikan melalui program-program CSR Perseroan.

SAMBUTAN DIREKSI

Risiko, Peluang Usaha, dan Tantangan ke Depan

Banyak hal yang dapat memicu munculnya risiko maupun peluang usaha. Dalam mengelola risiko, Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Sepanjang tahun 2020, risiko kesehatan dan risiko kredit menjadi perhatian utama kami, menyusul terjadinya pandemi COVID-19. Kami meyakini dengan penerapan pengelolaan risiko yang baik maka Perseroan dapat mentransformasikan risiko dan tantangan yang ada menjadi peluang dan prospek usaha.

Di sisi lain, kami memandang adanya peluang usaha yang muncul pada era ini yaitu penggunaan *digital banking* dan pengembangan inovasi berbasis sistem teknologi informasi. Hal ini disatu sisi merupakan suatu peluang usaha bagi Perseroan, tetapi disisi lain juga merupakan tantangan yang cukup signifikan. Tantangan tersebut tidak hanya terkait dengan nilai investasi yang harus dikeluarkan oleh Perseroan untuk memberikan layanan digital, tetapi juga terkait dengan isu risiko teknologi dan kesiapan dari pemangku kepentingan Perseroan sendiri. Dalam menghadapi peluang dan tantangan tersebut Perseroan selalu berkomitmen untuk memberikan layanan perbankan digital yang aman dan terpercaya, termasuk menjaga kerahasiaan data nasabah.

Kami juga melihat prospek untuk penyaluran pembiayaan/kredit Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Financing*) masih terbuka lebar. Selama tahun 2020 ini terkait usaha yang merupakan klasifikasi

usaha keuangan berkelanjutan, Perseroan berfokus pada penyaluran kredit pada UMKM. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi regional, dan mengarahnya pertumbuhan berbasis lingkungan dan sosial, kami memandang adanya potensi yang cukup besar untuk menyalurkan pendanaan-pendanaan pada proyek-proyek ramah lingkungan. Peluang ini seiring dengan terus meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Apresiasi Kami

Atas pencapaian kinerja selama tahun 2020, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada segenap jajaran Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan arahan, melakukan pengawasan, dan memberikan kepercayaan penuh kepada Direksi untuk melaksanakan tugasnya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melanjutkan pengelolaan Perseroan. Kepada seluruh nasabah, mitra, dan masyarakat sekitar wilayah operasi Perseroan, kami mengucapkan terima pula atas kepercayaannya selama ini.

Khusus kepada seluruh insan Bank Banten yang telah bekerja keras dan optimal dalam pencapaian kinerja ini, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami berharap pencapaian ini dapat menjadi pendorong untuk terus dilakukannya perbaikan-perbaikan dan pembenahan untuk mencapai keberlanjutan Perusahaan.

Banten, 11 Mei 2021
Atas Nama Direksi



KEMAL IDRIS
Direktur

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN (RAKB) 2020

➤ Keterlibatan *stakeholder* Bank Banten menjadi komitmen bersama Perseroan dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan. Proses internalisasi budaya serta peran serta masyarakat dalam menciptakan nilai baru untuk menciptakan Banten yang lebih baik menjadi bukti nyata kehadiran Perseroan dalam kegiatan perekonomian Provinsi Banten. Tujuan Keuangan Berkelanjutan tahun 2020 juga telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Banten.

KOMITMEN DAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Sebagai komitmen Perseroan dalam mendukung implementasi keuangan berkelanjutan Sesuai dengan ketentuan OJK, Perseroan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk periode lima tahunan. Isi RAKB juga telah disusun sejalan dengan strategi bisnis dan dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja Perseroan secara jangka pendek 1 (satu) tahun dan jangka panjang 5 (lima) tahun yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

Sebagai komitmen Perseroan dalam memenuhi keinginan pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan dalam mendukung implementasi keuangan berkelanjutan, perusahaan telah membuat visi dan misi yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan.

Tujuan RAKB

Keterlibatan *stakeholder* Bank Banten menjadi komitmen bersama bank dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan. Proses internalisasi budaya serta peran serta masyarakat dalam menciptakan nilai baru untuk menciptakan Banten yang lebih baik menjadi bukti nyata kehadiran Perseroan dalam kegiatan perekonomian Provinsi Banten. Tujuan Keuangan Berkelanjutan tahun 2020 juga telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Banten.

Strategi Keberlanjutan

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank berdampak positif bagi keberadaan Bank dan para pemangku kepentingan dalam jangka panjang secara menyeluruh dan terpadu. Komitmen tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan dan mengendalikan risiko, terutama risiko sosial dan lingkungan. Penyusunan RAKB tahun 2019-2023 berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, emiten dan Perusahaan Publik.

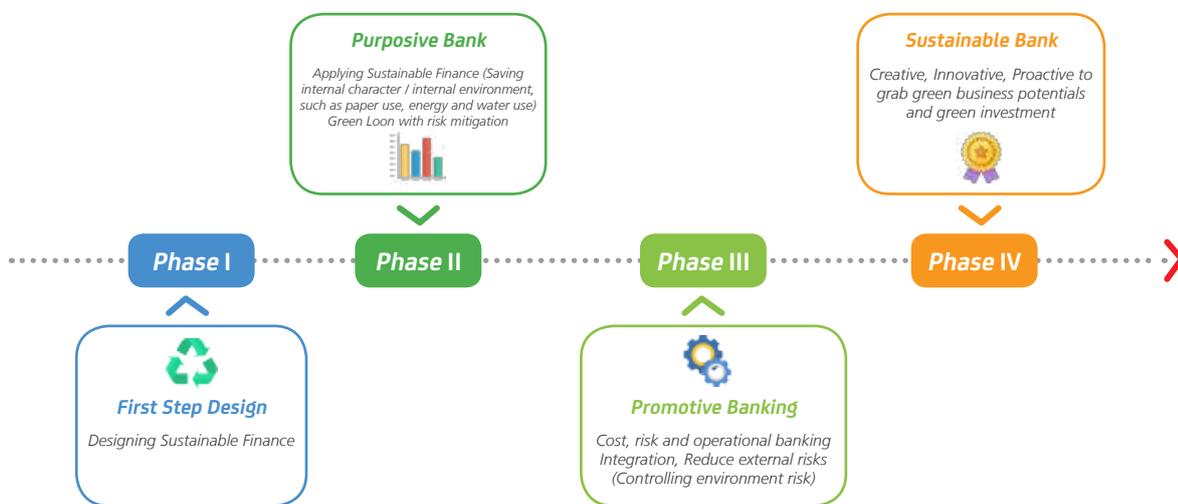
Strategi Perseroan dalam melaksanakan keuangan berkelanjutan didasari dari semangat seluruh *stakeholder*

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN (RAKB) 2020

untuk membangun Banten yang lebih baik dan menjadi Bank Kebanggaan Masyarakat Banten. Sebagai pelaku industri keuangan perbankan dewasa ini menjadi salah satu penggerak roda perekonomian, fungsinya pada era sekarang telah bergeser tidak hanya pada aspek ekonomi, melainkan tanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan yang berkesinambungan sehingga menciptakan keberlanjutan tatanan sosial yang berorientasi pada lingkungan secara luas. Perseroan berupaya memberikan kinerja terbaik untuk menjadi “Bank Kebanggaan Masyarakat Banten” dengan berkontribusi terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan di wilayah Provinsi Banten.

Rencana strategis penerapan keuangan berkelanjutan ini akan dilaksanakan secara bertahap melalui 4 (empat) fase yang akan diimplementasikan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Fase kedua, menjadi *Purposive Banking*, pada tahun 2020 - 2021 Perseroan fokus untuk menciptakan nilai yang mengedepankan keuangan berkelanjutan, dengan mengaplikasikan penciptaan nilai internal dimulai dari karyawan Perseroan dengan kebijakan yang menitikberatkan kepada, lingkungan kerja, seperti penggunaan kertas, air dan energi lainnya yang dapat dikurangi untuk menciptakan efisiensi yang ramah terhadap lingkungan tanpa mengurangi esensi dari penggunaan. Selanjutnya Perseroan akan mulai mengaplikasikan dukungan terhadap produk kredit yang mendukung SDG's, terutama pada kredit UMKM dan juga kredit konstruksi yang berfokus pada pembangunan yang berdampak bagi sosial ekonomi di provinsi Banten.



Fase pertama, menentukan desain yang akan digunakan Perseroan untuk menuju *sustainable banking*, serta kelengkapan kebijakan yang mendukung untuk menerapkan *sustainable banking*. Fase ini sudah dilakukan oleh Perseroan di tahun 2019 dengan menciptakan ekosistem organisasi dan inisiatif budaya untuk mengarahkan kebijakan yang berfokus pada *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam menyusun RAKB, khususnya program pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, Perseroan berpedoman pada strategi usaha sebagaimana yang tertuang dalam rencana Bisnis Bank, serta mempertimbangkan kondisi permodalan bank, kinerja, portofolio pembiayaan, kondisi ekonomi makro, dan isu dunia. Beberapa isu global ini diantaranya adalah krisis air bersih, dan kesenjangan sosial yang dapat menjadi faktor signifikan yang menentukan strategi Keberlanjutan.

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN (RAKB) 2020

Adapun pada tahun 2020 dengan segala kondisi yang ada, Perseroan berfokus kepada 3 aspek keuangan berkelanjutan

1. Sosial dan Lingkungan
2. Penciptaan Nilai Internal Dalam Beroganisasi yang Bertanggung Jawab
3. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi

Permasalahan dan Isu Penerapan RAKB

Perseroan telah menerapkan aspek keberlanjutan dan prinsip Keuangan Berkelanjutan, serta menjalankan rencana aksi jangka pendek yang menjadi prioritas dalam RAKB 2019-2023. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, permasalahan yang dihadapi Bank dalam menjalankan RAKB 2020, antara lain:

1. Isu lingkungan dan/atau sosial pada sektor perkebunan antara lain: kebakaran lahan, berkurangnya keanekaragaman hayati, isu legalitas hak atas tanah, dan isu-isu lainnya yang berhubungan dengan keberlanjutan Bisnis.
2. Dampak ekonomi paska pandemi covid 19
3. Kurangnya pemahaman mengenai aspek keberlanjutan dan prinsip Keuangan Berkelanjutan, baik dari karyawan Perseroan maupun pemangku kepentingan.
4. Terbatasnya sertifikasi yang menunjang Keuangan Berkelanjutan.
5. Terbatasnya inisiatif *green office*.
6. Terbatasnya *green project* yang dapat dibiayai oleh Bank.
7. Masih perlunya waktu implementasi keberlanjutan pada berbagai aktivitas usaha Perseroan.

Atas permasalahan atau kendala yang ada, maka Perseroan melakukan berbagai solusi agar permasalahan dapat diselesaikan atau diminimalkan dampak negatifnya. Upaya ini dilakukan, di antaranya:

1. Menyelenggarakan pelatihan/sosialisasi terkait keberlanjutan dan Keuangan Berkelanjutan untuk para karyawan.

2. Melakukan kampanye dan berbagai inisiatif terkait lingkungan, dengan melibatkan unit-unit kerja lain, seperti kampanye membawa botol minum bagi seluruh karyawan untuk pengurangan penggunaan botol minum plastik.
3. Melakukan sosialisasi kebijakan keberlanjutan kepada unit-unit kerja terkait.

Pengaruh adanya kendala implementasi RAKB, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Inisiatif terkait lingkungan kerja yang ramah lingkungan belum menjangkau seluruh gedung Bank
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap *green business*.
3. Kesadaran atas dampak perubahan iklim belum menyeluruh dipahami oleh pemangku kepentingan.

Tantangan Penerapan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam melaksanakan RAKB, Perseroan menghadapi tantangan penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan, di antaranya:

1. Adanya kesenjangan pengetahuan dalam pemahaman dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mengenai implementasi Keuangan Berkelanjutan.
2. Keterbatasan ruang gerak Perseroan.
3. Terdapat kebijakan Pemerintah yang belum bersifat mandatori, sehingga tingkat pemenuhan/kepatuhan debitur masih lemah.
4. Belum adanya sinergi antar Kementerian (Pusat) terhadap regulasi yang mendukung implementasi keuangan berkelanjutan di daerah (Provinsi Banten).
5. Masih terbatasnya Proyek Hijau (*Green Project*) di Indonesia sehingga prinsip pembiayaan hijau (*green financing*) belum dapat diterapkan sepenuhnya.



RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN (RAKB) 2020

Untuk menghadapi tantangan dan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target dalam RAKB, maka diperlukan pengelolaan risiko secara komprehensif dan terintegrasi.

Salah satu komponen utama adalah penerapan tata kelola manajemen Perseroan yang kuat yang berfungsi meningkatkan mekanisme *four eyes principle* dan transparansi dalam seluruh proses manajemen risiko. Selain itu, Perseroan menjadikan manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya, aktivitas operasional, dan proses pengambilan keputusan. Pada level operasional manajemen risiko sehari-hari, Perseroan menerapkan konsep tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) dengan melibatkan

seluruh jajaran dalam organisasi mulai dari Direksi, manajemen senior dan seluruh karyawan.

Selain pengelolaan risiko, Perseroan juga melakukan mitigasi risiko, antara lain melalui pelaksanaan peningkatan kapasitas pemahaman Keuangan Berkelanjutan, diantaranya:

1. Melakukan pelatihan internal di seluruh jenjang organisasi
2. Melakukan sosialisasi
3. Melakukan pelatihan internal pada sektor-sektor industri yang menjadi fokus Perseroan
4. Melakukan sosialisasi mengenai digitalisasi platform di internal Perseroan dalam rangka penerapan keberlanjutan dan digitalisasi bank.





02

> TENTANG LAPORAN INI

Laporan ini merupakan laporan pertama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, disebut juga "Perseroan" atau "Bank". Laporan ini sebagai komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Sebagai salah satu perusahaan layanan jasa keuangan yang ada di Banten, Perseroan memiliki tanggung jawab besar untuk dapat membantu masyarakat sekitar agar mampu mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki.



TENTANG LAPORAN INI

Laporan Keberlanjutan ini berisi laporan pelaksanaan dan pencapaian berbagai inisiatif keberlanjutan Perseroan yang diterbitkan terpisah dari Laporan Tahunan. Walau diterbitkan terpisah, kedua Laporan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi.

Periode, Siklus Laporan, Ruang Lingkup dan Batasan Laporan

Laporan ini diterbitkan setiap tahun dengan kurun waktu pelaporan 1 Januari - 31 Desember, kecuali diindikasikan lain. Laporan ini berisi tentang semua kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan Perseroan selama satu tahun kalender 2020. Melalui laporan ini Perseroan berharap para pemangku kepentingan bisa memperoleh gambaran lebih menyeluruh dan terbuka mengenai segala aktivitas serta perkembangan kegiatan pembangunan berkelanjutan yang telah dijalankan oleh Perseroan, untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. [102-45, 102-50, 102-51, 102-52]

Laporan keberlanjutan ini disusun sebagai sumber informasi bagi para investor termasuk para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Penyusunan Laporan ini merupakan tanggung jawab penuh Direktur Utama. Adapun data keuangan yang digunakan merujuk pada data keuangan yang terdapat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Data keuangan juga disajikan dalam dua atau lebih periode berturut-turut untuk melihat perubahan baik positif ataupun negatif atas kinerja keuangan Perseroan. Kami menerbitkan laporan ini menggunakan dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan menggunakan denominasi Rupiah untuk data keuangan. Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2020, tidak ada pernyataan ulang yang bersifat memperbaiki laporan sebelumnya. Selain itu, juga tidak terdapat perubahan dalam daftar Topik Material dan Batasan Topik. Laporan ini terdapat dua versi yakni edisi cetak dan edisi unduhan yang tersedia pada situs resmi Perseroan dengan alamat www.bankbanten.co.id. [102-48, 102-49]

Acuan dalam Pembuatan Laporan

Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini mengacu pada POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan per tanggal 1 Januari 2019. Selain itu, laporan ini juga disusun berdasarkan Standar Global Reporting Initiative (GRI) terbaru yaitu versi 2020 yang telah diakui secara global sebagai pedoman praktis yang mudah diaplikasikan bagi semua organisasi tak terkecuali lembaga jasa keuangan. Standar GRI adalah rujukan yang dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSBB) – lembaga yang dibentuk oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan ini disusun dengan Pilihan Inti sesuai dengan Standar GRI. [102-54]

Laporan ini kami susun dengan menyajikan semua informasi yang wajib atau direkomendasikan pengungkapannya oleh kedua pedoman di atas yakni POJK No.51/POJK.03/2017 dan Standar GRI. Untuk memberikan kemudahan pembaca dalam menemukan informasi yang sesuai dengan kedua pedoman, kami mencantumkan nomor indikator atau angka pengungkapan kedua pedoman di belakang kalimat atau alinea yang sesuai. Data lengkap kecocokan informasi Perusahaan dengan POJK No.51/POJK.03/2017 maupun Indeks Standar GRI disajikan di bagian belakang laporan ini, dimulai pada halaman 86-89. [102-55]

Mendefinisikan Isi Laporan dan Batasan Topik

Dalam menyusun Laporan Keberlanjutan sesuai dengan opsi inti berdasarkan Standar GRI, terdapat 4 (empat) prinsip dalam menentukan isi laporan keberlanjutan, yaitu pelibatan pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas, dan kelengkapan laporan. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang kegiatan, dampak, dan ekspektasi substantif organisasi, serta kepentingan para pemangku kepentingan.

Penerapan keempat prinsip di atas akan sangat menentukan kualitas dari laporan Keberlanjutan. Sesuai dengan standar GRI, Bank telah menimplementasikan enam prinsip pelaporan keberlanjutan yang akan menentukan kualitas Laporan Keberlanjutan. Kami yakin bahwa Laporan Keberlanjutan yang kami susun telah mengakomodasi keenam prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan yang terdiri dari akurasi, keseimbangan, kejelasan, keterbandingan, keandalan, dan ketepatan waktu.

Standar GRI memperkenankan entitas untuk memilih opsi pelaporan yaitu opsi komprehensif atau opsi inti. Perseroan telah memutuskan untuk penggunaan opsi inti agar Perseroan dapat memfokuskan pada pelaporan topik-topik material yang penting bagi pemangku kepentingan dan penting bagi Perseroan. Dalam memilih topik material yang kami laporkan dalam Laporan Keberlanjutan ini, Kami menetapkan empat langkah dalam menentukan topik dan isi laporan sesuai dengan Standar GRI, yaitu:

1. Identifikasi: Kami melakukan identifikasi terhadap topik-topik yang material/signifikan dan

menetapkan batasan (*boundary*).

2. Prioritas: Kami membuat prioritas atas topik-topik yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya.
3. Validasi: Kami melakukan validasi atas topik-topik yang dinilai material tersebut.
4. Review: Kami melakukan review atas laporan setelah diterbitkan guna meningkatkan kualitas laporan tahun berikutnya.

Dalam mengidentifikasi topik-topik material dan menetapkan batasan (*boundary*), Perseroan telah melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilanjutkan dengan melakukan validasi dan evaluasi atas Laporan keberlanjutan tahun sebelumnya. [103-1, 103-3]

Berdasarkan FGD Perseroan melakukan uji materialitas atas keseluruhan topik yang ada dalam GRI versi 2020. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) topik yang diuji. Uji materialitas dilakukan dengan menggunakan survei kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Berikut adalah matriks materialitas dan daftar topik material yang dianggap penting bagi pemangku kepentingan dan Perseroan serta batasannya.

Matriks Topik Material Laporan Keberlanjutan Bank Banten



TENTANG LAPORAN INI

Daftar topik material dan batasannya

Topik Material [102-47]	Kenapa Topik Ini Material [103-1]	Nomor Pengungkapan GRI Standards	Batasan Topik [102-46]	
			Di dalam Bank Banten	Di luar Bank Banten
Topik Ekonomi				
Kinerja Ekonomi	Menggambarkan pencapaian dan kinerja Perseroan selama tahun pelaporan	201-1, 201-3, 201-4	✓	✓
Keberadaan Pasar	Menggambarkan keberadaan pasar bagi Perseroan	202-1, 202-2	✓	✓
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	Menggambarkan manfaat atas keberadaan Perseroan bagi masyarakat	203-1, 203-2	✓	✓
Topik Lingkungan				
Material	Menggambarkan upaya Perseroan untuk menghemat penggunaan material, khususnya kertas.	301-1	✓	
Energi	Menggambarkan kepedulian Perseroan terhadap pengelolaan energi yang ketersediannya kian terbatas	302-1, 302-3, 302-4, 302-5	✓	
Air dan Limbah Air	Menggambarkan kepedulian Perseroan terhadap pengelolaan sumber daya air yang ketersediannya kian terbatas dan bagaimana pengelolaan limbah air	303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5	✓	
Kepatuhan Lingkungan	Menggambarkan komitmen terhadap berbagai peraturan lingkungan sehingga operasional Perseroan tidak berdampak negatif bagi lingkungan	307-1	✓	✓
Topik Sosial				
Ketenagakerjaan	Menggambarkan komitmen Perseroan tentang pentingnya pengelolaan pegawai/SDM	401-1, 401-2, 401-3	✓	
Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman	403-1, 403-2, 403-3, 403-4	✓	
Pelatihan dan Pendidikan	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja	404-2, 404-3	✓	
Keberagaman dan Kesempatan yang Setara	Menggambarkan kebijakan Perseroan untuk memastikan adanya keberagaman dan pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan	405-1, 405-2	✓	
Non-diskriminasi	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam menghargai kesamaan antar-sesama	406-1	✓	✓
Masyarakat Lokal	Menggambarkan komitmen Perseroan terhadap keterlibatan masyarakat di sekitarnya dalam berbagai program/kegiatan	413-1, 413-2	✓	✓
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	Menggambarkan bagaimana upaya Perseroan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pelanggan	416-2	✓	✓
Pemasaran dan Pelabelan	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam mentaati kaidah pemasaran yang baik, serta penyediaan informasi produk bagi pelanggan/konsumen	417-1, 417-3	✓	✓
Privasi Pelanggan	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam menjaga kerahasiaan data pelanggan	418-1	✓	✓

Eksternal Assurance

Baik GRI maupun POJK merekomendasikan penggunaan *external assurance* oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan kualitas dan keandalan informasi yang disampaikan dalam laporan ini. Dengan pertimbangan tertentu, pemeriksaan isi Laporan ini dilakukan oleh tim internal Perseroan. Namun demikian, Perseroan menjamin dan memastikan bahwa semua data dan informasi yang ada dalam laporan ini telah melalui proses verifikasi dan review oleh manajemen puncak demi menyajikan laporan keberlanjutan yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. [102-56]

Aksesibilitas dan Umpan Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah dan agar Perseroan dapat melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang,

Perseroan menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir laporan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan. Perseroan memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi: [102-53]

Divisi Sekretaris Perusahaan

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
Jl. Jenderal Sudirman Kemang Ruko Sembilan No, 4-6
Kota Serang - Banten, Indonesia
Telp. : +62 254 7917346
Email : corporate.secretary@bankbanten.co.id



03

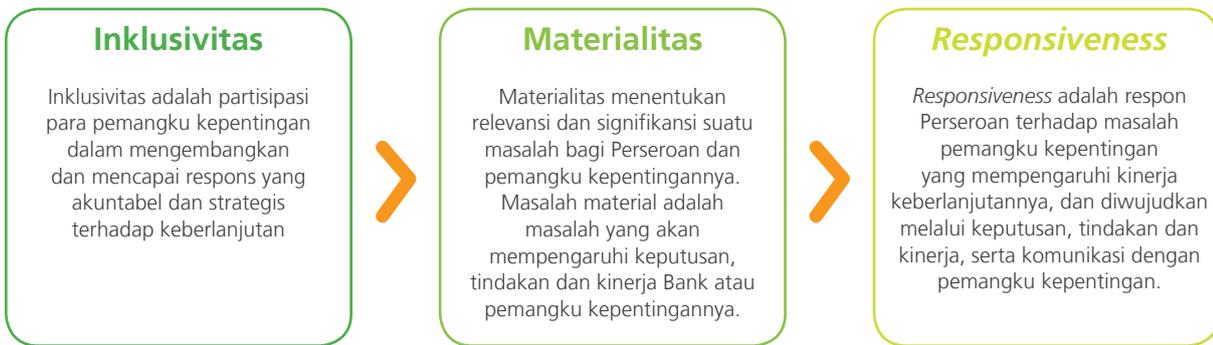
> PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pada akhir tahun 2020 Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI. Dengan demikian komposisi kepemilikan saham Perseroan oleh PT Banten Global Development meningkat menjadi **78,21%**. Sedangkan kepemilikan Masyarakat turun menjadi 21,79%

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Metode Identifikasi Kelompok Pemangku Kepentingan

Perseroan menerapkan beberapa prinsip dalam proses pelibatan pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan prinsip yang dikembangkan oleh AA1000 *Stakeholder Engagement Standard* (AA1000SES) 2015 dan ISO 26000.



Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Perseroan menggunakan metodologi identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan AA1000 *Stakeholder Engagement Standard* (AA1000SES) 2015 dan ISO 26000 sebagai panduan identifikasi dan interaksi pemangku kepentingan. Perseroan menggunakan hasil identifikasi tersebut dalam menjalankan pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*), pemetaan hal-hal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, dan merumuskan program-program berdasarkan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

Metode Identifikasi Kelompok Pemangku Kepentingan

<i>Dependency</i> (D)	Kelompok atau individu yang secara langsung atau tidak langsung bergantung pada aktivitas, produk atau layanan dan kinerja Perseroan, atau sebaliknya
<i>Responsibility</i> (R)	Kelompok atau individu yang memiliki, atau di masa depan mungkin memiliki, organisasi hukum, tanggung jawab komersial, operasional atau etika/moral atau sebaliknya
<i>Tension</i> (T)	Kelompok atau individu yang membutuhkan perhatian segera dari organisasi terkait dengan masalah keuangan, ekonomi, sosial atau lingkungan yang lebih luas
<i>Influence</i> (I)	Kelompok atau individu yang dapat berdampak pada Perseroan atau pemangku kepentingan pengambilan keputusan strategis atau operasional
<i>Diverse Perspective</i> (DP)	Kelompok atau individu yang pandangannya berbeda dapat mengarah pada pemahaman baru tentang situasi dan identifikasi peluang untuk tindakan yang mungkin tidak terjadi
<i>Proximity</i> (P)	Kelompok atau individu yang memiliki kedekatan geografis dengan wilayah operasional Perseroan

Pemangku Kepentingan, Metode Pelibatan, Frekuensi, Topik yang Diajukan dan Harapan Pemangku Kepentingan

Berdasarkan metode identifikasi pemangku kepentingan, Perseroan selalu berusaha secara optimal untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam kegiatan operasional Bank. Proses pelibatan pemangku kepentingan mencakup upaya Perseroan untuk memenuhi harapan dari setiap pemangku kepentingan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, dengan cara yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pemangku Kepentingan [102-40]	Basis Identifikasi [102-42]	Topik Pembahasan [102-44]	Metode Pelibatan [102-43]	Pendekatan dan Respons [102-43]	Frekuensi Pendekatan [102-43]
Pemegang Saham	D, R, I, P Hubungan ekonomi, kepemilikan dan legal	Peningkatan kinerja Perseroan	RUPS dan RUPSLB	Pelaporan Kinerja Perseroan pada RUPS	Setiap Tahun dan/vatau kapan dibutuhkan
Pemerintah & Otoritas Jasa Keuangan	D, R, T, I, DP, P Legal & kepentingan LJK	Tersedianya ketentuan dan kebijakan yang jelas atas program yang dikembangkan	Pelaporan kerja yang teratur kepada regulator dan pemerintah	Pelaporan pelaksanaan Ketaatan dan notifikasi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Minimal 5 (lima) kali dalam setahun melalui laporan kuartalan dan laporan tahunan
Masyarakat	D, R, T, I, DP, P Relasi sosial, lisensi sosial, tanggung jawab sosial, serta kedekatan dengan Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program CSR 2. Peningkatan edukasi dan pemahaman penggunaan keuangan yang efektif 	Pertemuan forum CSR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Program CSR. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3. Memberikan konsultasi dan pelatihan yang lebih luas mengenai perencanaan keuangan kepada masyarakat luas. 	Sepanjang tahun melalui aktivitas CSR
Nasabah	D, R, I, P Hubungan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan intensitas penyelenggaraan edukasi terkait produk dan layanan keuangan Perseroan, terutama bagi nasabah baru dan masyarakat yang belum teredukasi akses keuangan. 2. Peningkatan fasilitas dan akses perbankan serta keamanan transaksi. 3. Transparansi informasi layanan Bank. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website 2. Kunjungan langsung 3. Call center 4. Pengukuran kepuasan 5. Customer gathering 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsistensi penyelenggaraan program-program edukasi kepada setiap nasabah. 2. Meningkatkan sistem pada fasilitas dan keamanan transaksi perbankan. 3. Memberikan informasi akurat kepada setiap nasabah mengenai informasi terkini produk dan layanan perbankan. 	Sepanjang tahun melalui <i>customer service</i> dan <i>call center</i> Perseroan
Pegawai dan Organisasi Pegawai	D, R, T, I, P Legal dan pemangku kepentingan yang membantu pencapaian tujuan perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak-hak pegawai. 2. Meningkatkan efektivitas hubungan manajemen dan pegawai. 	Rapat kerja dengan serikat pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan hak penuh kepada pegawai terhadap PKB yang telah ditetapkan. 2. Melakukan pertemuan berkala antara manajemen dengan pegawai. 	Minimal setahun sekali
Rekanan	D, R, T, P Hubungan ekonomi dan legal	Transparansi dalam proses pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak Pemasok 2. Mitra investasi 3. Koordinasi operasional 	Melaksanakan sistem pengadaan yang mematuhi prinsip-prinsip panduan kerja dan standar etika.	Minimal setahun sekali melalui <i>event vendor gathering</i>
Media Massa	T, I, DP Relasi sosial, lisensi sosial	Keterbukaan informasi yang akurat dan terkini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press release 2. Media visit 3. Press Gathering 4. Press conference 	Memberikan informasi akurat mengenai berita terkini Perseroan.	Melakukan kunjungan ke unit bisnis Perusahaan untuk memperluas dan memahami bisnis bank.



04

> PROFIL
PERUSAHAAN



INFORMASI DATA PERUSAHAAN

 NAMA PERUSAHAAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk	NAMA PANGGILAN 								
 STATUS BADAN HUKUM Perseroan Terbuka / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	 TANGGAL PENDIRIAN 11 September 1992								
 DASAR HUKUM	Akta Bank No. 34 tanggal 11 September 1992 yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman SH., Notaris di Jakarta, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.103, Tambahan No. 6651 tanggal 26 Desember 1992, serta telah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui suratnya No. C2-9246-H.T.01.01.TH.92 tanggal 10 November 1992.								
 KEPEMILIKAN	<table border="0"> <tr> <td>PT Banten Global Development Masyarakat</td> <td>35,69% *)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>64,31% *)</td> </tr> <tr> <td>PT Banten Global Development Masyarakat</td> <td>78,21% **)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21,79% **)</td> </tr> </table>	PT Banten Global Development Masyarakat	35,69% *)		64,31% *)	PT Banten Global Development Masyarakat	78,21% **)		21,79% **)
PT Banten Global Development Masyarakat	35,69% *)								
	64,31% *)								
PT Banten Global Development Masyarakat	78,21% **)								
	21,79% **)								
 MODAL DASAR Rp8.000.000.000.040	 MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH Rp. 2.173.359.918.090 *) Rp. 3.907.459.398.840 **)								
 BIDANG USAHA Perbankan Umum	 JUMLAH KARYAWAN 950 orang								
 JARINGAN KANTOR	1 Kantor Pusat, 1 KPNO, 26 Kantor Cabang, 1 Kantor Wilayah, 10 Kantor Cabang Pembantu, 5 Mobil Kas Keliling, dan 150 ATM								
 ALAMAT PERUSAHAAN PUSAT	Jl. Jenderal Sudirman Kemang Ruko Sembilan No. 4-6 Kota Serang, Banten ☎ 0254-7917346 ✉ corporate.secretary@bankbanten.co.id 🌐 1500 410 🌐 www.bankbanten.co.id								
 MEDIA SOSIAL	📘 @bpd Banten 🐦 @BankBanten 📷 bankbanten_id								
 KONTAK PERUSAHAAN	Sekretaris Perusahaan Jl. Jenderal Sudirman Kemang Ruko Sembilan No, 4-6 Kota Serang - Banten, Indonesia ☎ 0254-7917346 ✉ corporate.secretary@bankbanten.co.id								

*) Per akhir tahun 2020 dimana Perseroan masih dalam proses pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas
 **) Per 31 Januari 2021 setelah Penawaran Umum Terbatas VI selesai dilaksanakan

SEKILAS BANK BANTEN

Cikal bakal Bank Banten dimulai dari terbitnya Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor 193 tahun 1950 tertanggal 9 Mei 1950, tentang prosedur pengembalian tenaga-tenaga darurat Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke masyarakat semasa agresi militer Belanda kedua. Pada saat itu Mayor Raden Sjachra Sastrakusumah, petinggi militer yang pernah menjadi Komandan Sektor XV Pandeglang menggagas mendirikan sebuah koperasi dan perbankan milik para veteran. Dari dana tunjangan, para veteran sepakat untuk menggunakan modal saham untuk pendirian Bank Banten.



Hingga kemudian pada tanggal 27 September 1954, Raden Sjachra Sastrakusumah, bersama delapan rekan sejawatnya mendirikan lembaga perbankan berbasis koperasi bernama Maskapai Andil Indonesia (MAI) Bank Banten, yang berpusat di daerah swatantra tingkat II Pandeglang. Pada masa itu Bank Banten menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat Pandeglang dan di wilayah Keresidenan Banten.

Perkembangan MAI Bank Banten mencapai puncaknya pada tahun 1957 dengan mendirikan gedung di jantung Kabupaten Pandeglang yang kemudian diresmikan pada tanggal 9 September 1957 oleh Bapak Koperasi Indonesia Dr. Muhammad Hatta didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mayor AH Nasution, dan Gubernur Bank Indonesia Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Bank Banten bahkan akhirnya pada saat itu mampu membuka cabang di Jakarta dan di Bandung.

SEKILAS BANK BANTEN

Pada saat Banten resmi menjadi sebuah provinsi ke-30 yang mandiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2000 serta dengan melihat kejayaan Bank Banten pada masa silam, menjadi motivasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk memiliki bank pembangunan daerahnya sendiri. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten.

Pada 29 Juli 2016 Perseroan resmi beroperasi dengan menggunakan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sejalan dengan dilakukannya akuisisi oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/KDK.03/2016 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pundi Indonesia Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Sebelum menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Bermula pada saat pendirian ditahun 1992, yaitu PT Executive International Bank dan selanjutnya menjadi PT Bank Eksekutif Internasional hingga kemudian menjadi PT Bank Pundi Indonesia Tbk.

Pasca akuisisi Bank oleh PT Banten Global Development, terjadi perubahan strategi dan kebijakan perusahaan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah dan mitra Perseroan terkait dengan status sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD). Saat ini Perseroan melayani nasabah simpanan, penyaluran Kredit (UMKM, Kredit Konsumer dan Kredit Komersial), serta jasa-jasa lainnya. Kedepannya Perseroan akan menjadi mitra Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan pengelolaan kas daerah.

Pada akhir tahun 2020 Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI. Dengan demikian komposisi kepemilikan saham Perseroan oleh PT Banten Global Development meningkat menjadi 78,21%. Sedangkan kepemilikan Masyarakat turun menjadi 21,79%.



VISI, MISI, & NILAI-NILAI PERUSAHAAN

VISI



Menjadi Bank yang terbaik dan mitra terpercaya

MISI



- Mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten
- Memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah, dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan

VISI, MISI, & NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Nilai-Nilai Perusahaan



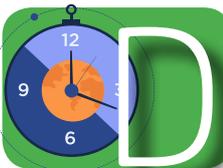
Profesional



Andal



Nasabah Diutamakan



Disiplin



Antusias



Integritas

PRODUK DAN JASA LAYANAN

Secara umum kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan pembiayaan, serta memberikan layanan jasa keuangan lainnya. Dalam menyampaikan kebutuhannya, Perseroan memiliki produk dan layanan yang sangat beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Produk dan Jasa Bank Banten

Produk Simpanan	Produk Kredit	Produk Digital	Layanan Perbankan
Tabungan, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Tabungan Mikro • Tabungan Banten • Tabungan Harapan • Tabungan Harapan untuk Pensiunan • Tabungan Simpel • Tabungan Sosial Banten/ JAMSOSRATU 	Kredit Konsumer, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Kredit Karya Guna • Kredit Pra Kinaya • Kredit Kinaya • Kredit Tunjangan Hari Tua (Pensiunan) • Kredit Multiguna • Kredit Beragunan Tunai Konsumer 	E-Samsat	Bank Persepsi
Deposito	Kredit Komersial, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Kredit Konstruksi • Kredit Modal Kerja Umum • Kredit Investasi Umum 	SP2D Online	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
Giro	Kredit UMKM, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Kredit Usaha Bangun Banten (Kredit Bangun Tunas, Kredit Bangun Mandiri, Kredit Bangun Sejahtera) • Kredit Linkage • Kredit Program 	MPN-G2	Mitra Layanan Taspen

WILAYAH OPERASIONAL

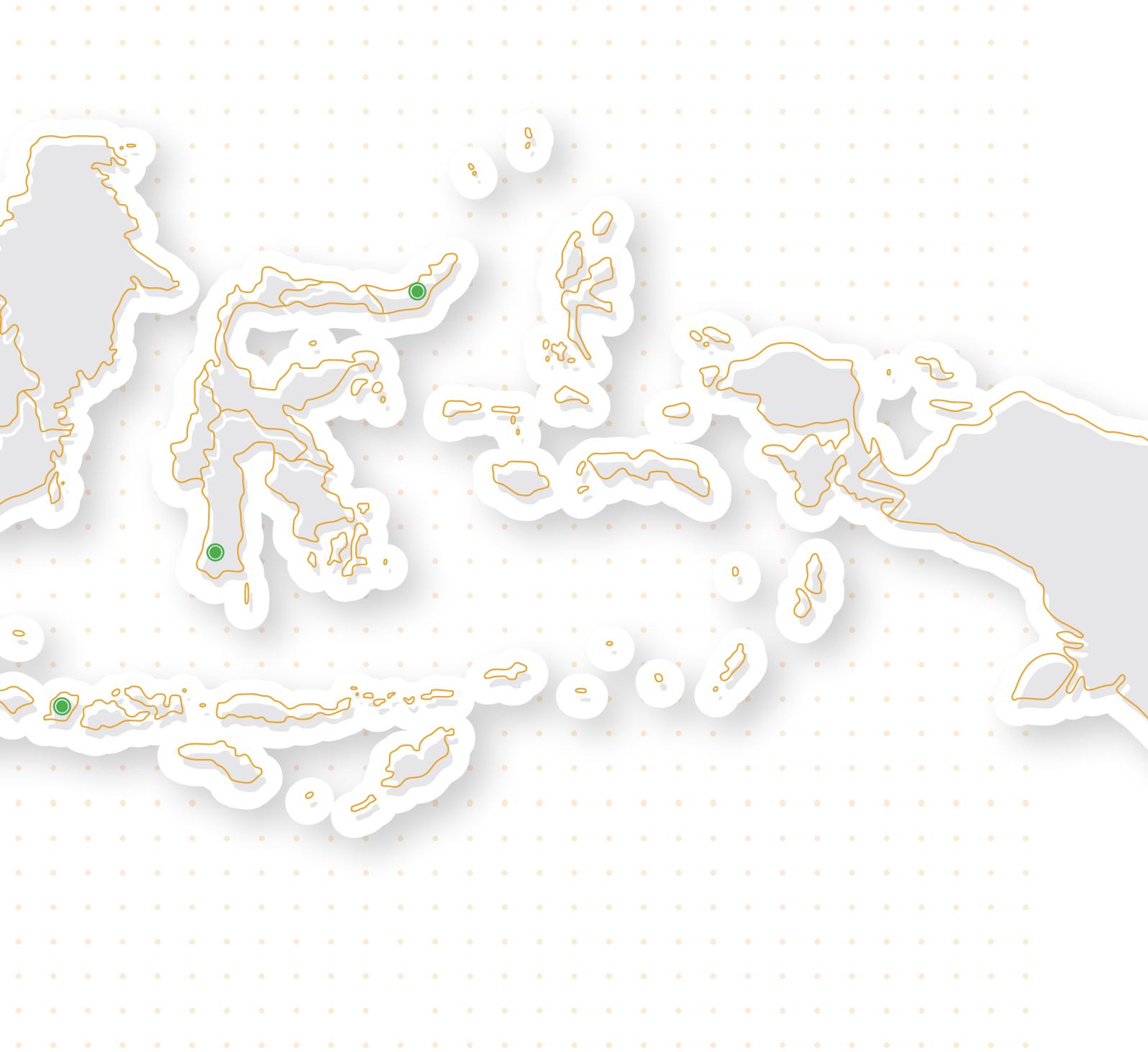
36

Kantor Jaringan

meliputi :

Serang, Cilegon, Balaraja, Pendeglang,
Tangerang, Tangerang Selatan,
Rangkasbitung, Jakarta, Bekasi,
Karawang, Bandung, Semarang,
Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang,
Lampung, Medan, Palembang,
Pekanbaru, Denpasar, Makassar dan
Manado.

WILAYAH OPERASIONAL



WILAYAH OPERASIONAL

Pasar Yang Dilayani

Produk dan layanan yang ditawarkan Perseroan membidik segmen pasar dari seluruh golongan masyarakat seperti pegawai, rumah tangga, karyawan, pelajar, dan masyarakat umum, dan juga kalangan dunia usaha dan UMKM. Secara pasar yang dilayani, sebagai bank Pembangunan Daerah, Perseroan memfokuskan pelayanan perbankan pada masyarakat di Provinsi Banten dan sekitarnya.

SKALA ORGANISASI

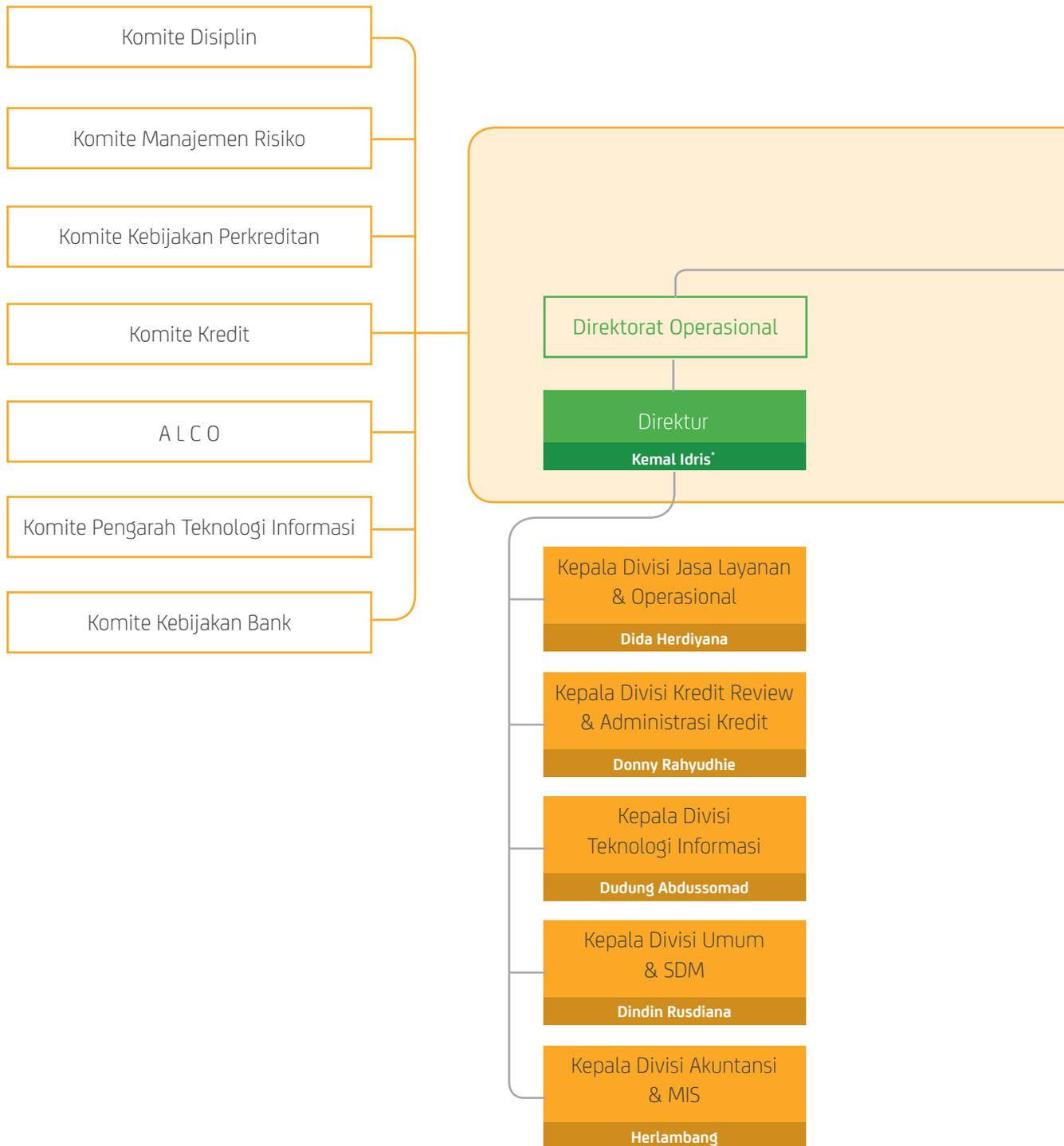
No	Uraian	Periode Pelaporan	
		2020	2019
1	Jumlah Karyawan (orang)	950	982
2	Jumlah Pendapatan Bunga (juta Rp)	372.209	553.871
3	Jumlah Ekuitas (juta Rp)	1.361.581	549.533
4	Jumlah Liabilitas (juta Rp)	3.975.700	7.547.795
5	Jumlah Aset (juta Rp)	5.337.281	8.097.328
6	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (juta Rp)	Rp. 2.173.360 *) Rp. 3.907.459 **)	Rp2.035.889
6	Jaringan Kantor	1 Kantor Pusat 1 KPNO 26 Kantor Cabang 10 Kantor Cabang Pembantu 5 Mobil Kas Keliling 150 ATM	1 Kantor Pusat 1 KPNO 26 Kantor Cabang 11 Kantor Cabang Pembantu 4 Kantor Kas 28 Payment Point 5 Mobil Kas Keliling 150 ATM
7	Produk dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Dana pihak ketiga • Kredit/Pembiayaan • Layanan Jasa Perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana pihak ketiga • Kredit/Pembiayaan • Layanan Jasa Perbankan

*) Per akhir tahun 2020 dimana Perseroan masih dalam proses pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas

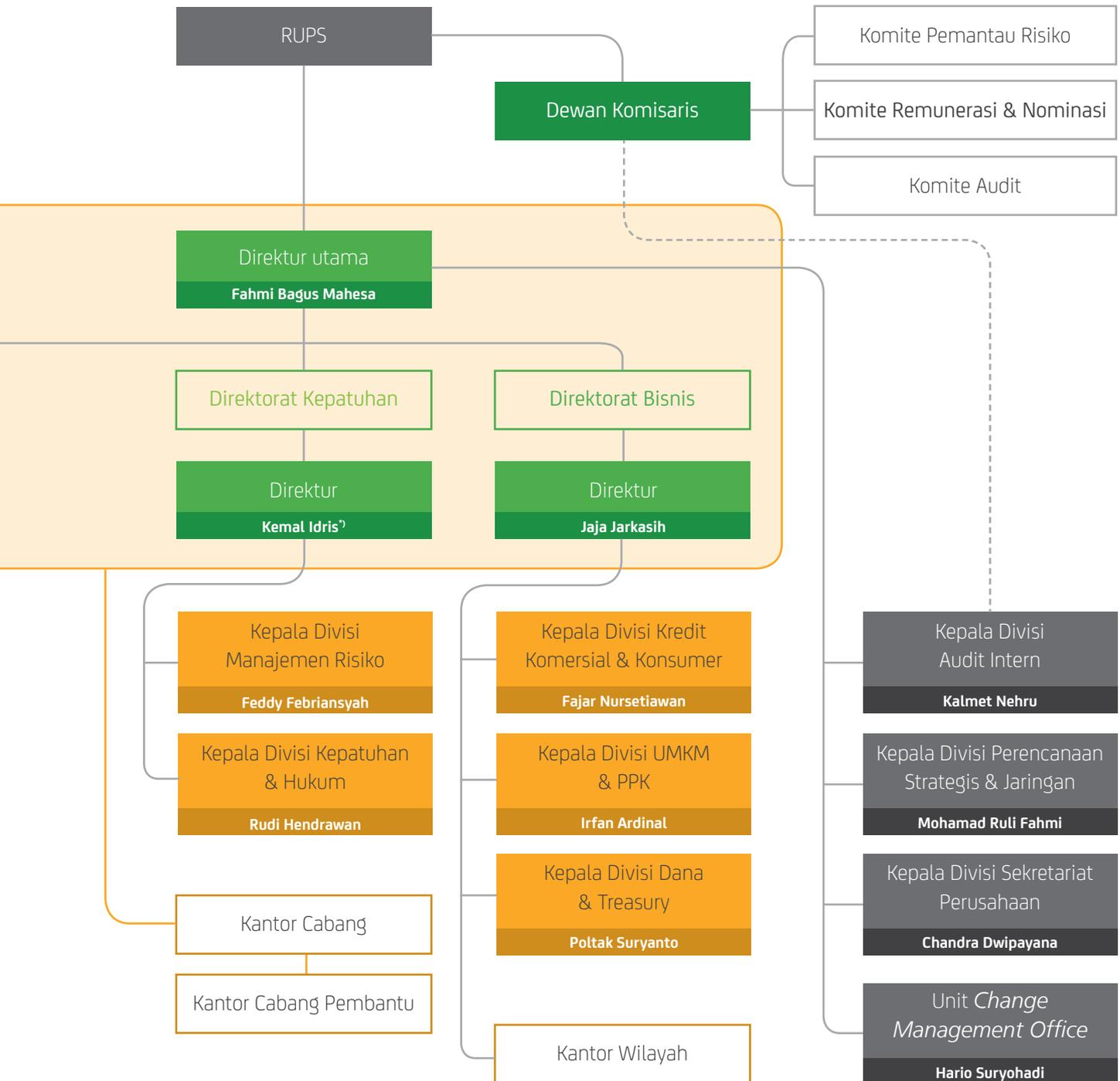
***) Per 31 Januari 2021 setelah Penawaran Umum Terbatas VI selesai dilaksanakan



STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI



*) Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan

PEMEGANG SAHAM

Komposisi Kepemilikan Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Persentase Kepemilikan (%)	Nilai (Rp)
	Nilai Saham = Rp1000 per lembar untuk saham seri A, Rp180 per lembar untuk saham seri B, Rp50 per lembar untuk saham seri C		
PT Banten Global Development*)	3.269.755.661	35,69%	588.556.018.980
Masyarakat*)	5.890.598.676	64,31%	1.584.803.899.110
Jumlah	9.160.354.337	100,00%	2.173.359.918.090
PT Banten Global Development**)	34.289.755.661	78,21%	2.139.556.018.980
Masyarakat**)	9.552.588.291	21,79%	1.767.903.379.860
Jumlah	43.842.343.952	100,00%	3.907.459.398.840

*) Per akhir tahun 2020 dimana Perseroan masih dalam proses pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas

**) Per 31 Januari 2021 setelah Penawaran Umum Terbatas VI selesai dilaksanakan

Informasi Tentang Kepemilikan Saham oleh Manajemen

Hingga akhir tahun 2020, tidak ada satupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan secara langsung maupun tidak langsung.

RANTAI PASOKAN

Dalam menjalankan kegiatan pengadaan barang dan jasa, Perseroan bersinergi dengan mitra kerja atau rekanan atau pemasok. Perseroan berusaha untuk menjalin kerja sama dengan pemasok lokal, yakni berada dalam satu provinsi. Jika pemasok lokal tidak tersedia, Perseroan akan mencari pemasok dalam skala yang lebih luas cakupannya, baik skala regional (antar provinsi) maupun skala nasional (Jakarta). Pemilihan pemasok lokal, selain faktor kedekatan secara geografis sehingga biayanya lebih terjangkau, juga dipengaruhi oleh komitmen Perseroan untuk menumbuhkan ekonomi setempat. Selama tahun 2020, Perseroan menjalin kerja sama dengan 400 pemasok barang dan jasa.

Dalam menjalin kerja sama dengan pemasok, Perseroan melakukan seleksi yang ketat terkait pada aspek kepatuhan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku, aspek sosial dan lingkungan. Misalnya, yang berkaitan dengan peraturan tenaga kerja, keselamatan kerja, aspek lingkungan, hak asasi manusia, kebebasan berserikat, dan dampak keberadaannya terhadap masyarakat. Bank memastikan pemasok yang bekerja sama tidak memiliki pelanggaran baik dari segi legal, aspek lingkungan dan sosial.

TENAGA KERJA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan didukung oleh 950 orang karyawan. Dibandingkan dengan jumlah per 31 Desember 2019, jumlah tersebut menurun sebanyak 32 orang atau 3,26%.

Demografi karyawan berdasarkan jenis kelamin (orang)

Jenis Kelamin	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (orang)	Komposisi (%)	Jumlah (orang)	Komposisi (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Laki-laki	573	60,32%	586	59,67%	-13	-2,22%	↓
Perempuan	377	39,68%	396	40,33%	-19	-4,80%	↓
Jumlah	950	100,00%	982	100,00%	-32	-3,26%	↓

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)

Status Kepegawaian	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (orang)	Komposisi (%)	Jumlah (orang)	Komposisi (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Pegawai tetap	887	93,37 %	890	90,63 %	-3	-0,34 %	↓
Kontrak	63	6,63 %	90	9,16 %	-27	-30,00 %	↓
Probation	0	0,00 %	2	0,20%	-2	-100,00%	↓
Jumlah	950	100,00%	982	100,00%	-32	-3,26%	↓

Demografi karyawan berdasarkan tingkat jabatan (orang)

Tingkat Jabatan	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (orang)	Komposisi (%)	Jumlah (orang)	Komposisi (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Komisaris	2	0,21 %	2	0,20%	0	0,00%	=
Direktur	3	0,32%	3	0,31%	0	0,00%	=
Pemimpin Divisi	13	1,37%	14	1,43%	-1	-7,14%	↓
Pemimpin Wilayah	1	0,11%	1	0,10%	0	0,00%	=
Pemimpin Cabang Utama	25	2,63%	26	2,65%	-1	-3,85%	↓
Pemimpin Cabang Pembantu	11	1,16%	11	1,12%	0	0,00%	=
Pemimpin Kantor Kas	4	0,42%	4	0,41%	0	0,00%	=
Pemimpin Bagian	34	3,58%	33	3,36%	1	3,03%	↑
Manager	74	7,79%	72	7,33%	2	2,78%	↑
Supervisor	41	4,32%	39	3,97%	2	5,13%	↑
Staf (KP+Wilayah & Cabang)	742	78,11%	777	79,12%	-35	-4,50%	↓
Jumlah	950	100,00%	982	100,00%	-32	-3,26%	↑

TENAGA KERJA

Demografi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan (orang)

Tingkat Pendidikan	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (orang)	Komposisi (%)	Jumlah (orang)	Komposisi (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Pasca Sarjana/Strata 2 (S2)	25	2,63%	27	2,75%	-2	-7,41%	↓
Sarjana/Strata 1 (S1)	778	81,89%	805	81,98%	-27	-3,35%	↓
Diploma 3 (D3)	117	12,32%	117	11,91%	0	0,00%	=
SMU / SMK	30	3,16%	33	3,36%	-3	-9,09%	↓
Jumlah	950	100,00%	982	100,00%	-32	-3,26%	i

Demografi karyawan berdasarkan usia (orang)

Rentang Usia	2020		2019		Kenaikan (Penurunan)		
	Jumlah (orang)	Komposisi (%)	Jumlah (orang)	Komposisi (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)	
Di atas 56 tahun	3	0,32%	2	0,20%	1	50,00%	↑
51 - 55 tahun	31	3,26%	22	2,24%	9	40,91%	↑
46 - 50 tahun	104	10,95%	80	8,15%	24	30,00%	↑
41 - 45 tahun	166	17,47%	147	14,97%	19	12,93%	↑
36 - 40 tahun	240	25,26%	230	23,42%	10	4,35%	↑
31 - 35 tahun	134	14,11%	192	19,55%	-58	-30,21%	↓
26 - 30 tahun	190	20,00%	137	13,95%	53	38,69%	↑
18 - 25 tahun	82	8,63%	172	17,52%	-90	-52,23%	↓
Jumlah	950	100,00%	982	100,00%	-32	-3,26%	i

KEANGGOTAAN ASOSIASI

Sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan, Bank Banten bergabung dengan asosiasi yang keanggotaannya masih berlaku hingga tahun 2020 sebagai berikut:

Daftar Keanggotaan Asosiasi

No.	Nama Asosiasi/Perhimpunan	Posisi di Asosiasi (Pengurus/Anggota)	Iuran Keanggotaan
1	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Anggota	Rp. 1.000.000,-
2	FKDKP	Anggota	Rp. 5.000.000,-
3	ASBANDA	Anggota	Rp. 220.000.000,-
4	Lainnya (LAPSPI, ICSA, dan sebagainya)	Anggota	Rp262,233,333,-



05

> TATA KELOLA KEBERLANJUTAN



Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG bagi Perseroan merupakan suatu tata cara pengelolaan Perseroan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola di atas diperlukan struktur tata kelola yang baik. Sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur Tata Kelola Perusahaan terdiri dari organ utama perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.

Berikut wewenang dan tanggung jawab Organ Utama Perusahaan.

1. RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Bank, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk organ pendukung, antara lain:

1. Organ pendukung Dewan Komisaris
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Nominasi dan Remunerasi
 - c. Komite Pemantau Risiko
2. Organ pendukung Direksi
 - a. Komite-komite di bawah Direksi
 - Komite Aset dan Liabilitas atau *Asset & Liability Management Committee* (ALCO)
 - Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi Komite Manajemen Risiko Komite Kebijakan Bank Komite Kebijakan Perkreditan
 - Komite Disiplin
 - b. Sekretaris Perusahaan
 - c. Satuan Kerja Audit Intern

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS adalah organ tertinggi Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan forum dan saham dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kepentingan usaha Perseroan dan memperhatikan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan.

Di tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS, yaitu pada:

1. RUPS Luar Biasa (RUPS LB) 26 Februari 2020;
2. RUPS Tahunan (RUPS T) 17 Juli 2020; dan
3. RUPS Luar Biasa (RUPS LB) 02 Oktober 2020.

Adapun mata acara masing-masing RUPS adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB 26 Februari 2020

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru dan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui 2 tahapan Penawaran Umum Terbatas, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan demikian akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

Mata Acara RUPST 17 Juli 2020

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019;
2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020; dan
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

Mata Acara RUPSLB 02 Oktober 2020

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham Seri A dan Seri B Perseroan melalui Penggabungan Nilai Nominal Saham (Reverse Stock);
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru yaitu Seri C dan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian sekaligus melakukan pembatalan hasil RUPS Luar Biasa Perseroan pada tanggal 26 Februari 2020 untuk mata acara yang sama; dan
3. Penegasan persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui 2 tahapan Penawaran Umum Terbatas, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan demikian akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam anggaran dasar Perseroan dan *Board Charter* antara lain adalah:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan dan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dan auditor internal (SKAI), auditor eksternal serta hasil pengawasan pihak Otoritas;
4. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Undang-Undang dan Anggaran Dasar;
6. Memberitahukan kepada pihak otoritas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
7. Pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
8. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
9. Membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dan wajib melakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Komposisi Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2020, komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Media Warman	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama
Titi Khoiriah	Komisaris Independen

Semua anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Tugas dan tanggung jawab Direksi

Sebagaimana tercantum dalam *Board Charter* Direksi, tugas Direksi secara umum adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank;
3. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern;
4. Membentuk paling kurang Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap operasional Bank;
5. Membentuk paling kurang Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kebijakan Kredit dan *Asset Liability Committe* (ALCO), serta wajib mengevaluasi kinerja komite setiap akhir tahun;
6. Menyediakan data dan informasi yang akurat,

Komposisi Direksi

Hingga 31 Desember 2020, komposisi Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama
Jaja Jakarsih	Direktur
Kemal Idris	Direktur

Semua anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

7. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai;
8. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank;
9. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi;
10. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proyek bersifat khusus;
 - b. Didasari oleh kontrak kerja yang jelas; dan
 - c. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus;
11. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan UU dan Anggaran Dasar;
12. Bertanggung jawab secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng atas kerugian pihak lain akibat pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apabila terbukti:
 14. bukan karena kesalahan/kelalaiannya;
 15. telah melakukan pengurusan baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian;
 16. tidak mempunyai benturan kepentingan;
 17. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PENGELOLA KEBERLANJUTAN

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan Perseroan secara aktif melakukan pengembangan kompetensi terkait penerapan aspek keberlanjutan dan prinsip Keuangan Berkelanjutan. Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui *in-house training*,

seminar dan lokakarya (*workshop*) yang disampaikan oleh pihak ketiga. Sepanjang tahun 2020 Pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Pengelola Keberlanjutan adalah sebagai berikut:

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris

No	Tanggal	Nama	Jabatan	Judul / Jenis Pelatihan
1	31-Jan-20	Media Warman	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama	Workshop & FGD Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta Evaluasi Kebijakan Remunerasi dengan Mempertimbangkan Skala Usaha, Kompleksitas Usaha, Peer Group, Tingkat Inflasi, Kondisi dan Kemampuan Keuangan Bank sesuai POJK No. 45/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016.
2	31-Jan-20	Titi Khoiriah	Komisaris Independen	
3	5 – 6-Mar-20	Titi Khoiriah	Komisaris Independen	Sertifikasi Audit Intern Bank (Audit Level Supervisor)
4	16-Okt-20	Media Warman	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama	Strategi Penguatan Permodalan BPD dalam rangka Meningkatkan Peran BPD dan Penempatan Dana Pemerintah di BPD untuk Membantu Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.
5	16-Okt-20	Titi Khoiriah	Komisaris Independen	
6	26-Nov-20	Media Warman	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama	Workshop Economic Outlook 2021: BPD Menjadi Pondasi Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021.
7	26-Nov-20	Titi Khoiriah	Komisaris Independen	
8	7-Des-20	Media Warman	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama	Seminar Nasional & Kick Off Business 2021 (Bank Banten)
9	7-Des-20	Titi Khoiriah	Komisaris Independen	
10	14-Des-20	Media Warman	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama	Strategi BPDSI dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 (FKDK BPDSI)
11	14-Des-20	Titi Khoiriah	Komisaris Independen	

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PENGELOLA KEBERLANJUTAN

No	Tanggal	Nama	Jabatan	Judul / Jenis Pelatihan
12	23-Des-20	Media Warman	Komisaris Independen merangkap Plt. Komisaris Utama Independent Commissioner concurrently Acting President Commissioner	Strategi Penguatan Permodalan BPD untuk Meningkatkan Peran BPD dalam membantu Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di masa dan pasca Pandemi (Asbanda). Regional Development Bank Capital Solidification Strategy to Enhance the RDB Roles for the Acceleration of National Economic Recovery and post Pandemic (Asbanda).
13	23-Des-20	Titi Khoiriah	Komisaris Independen Independent Commissioner	

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi

No	Tanggal	Nama	Jabatan	Judul / Jenis Pelatihan
1	21-Jan-20	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Rapat Koordinasi Tahunan PPAK
2	21-Jan-20	Kemal Idris	Direktur	Rapat Koordinasi Tahunan PPAK
3	22-23-Feb-20	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Seminar Nasional BPDSI
4	02-Mar-20	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	CEO Meeting BPDSI
5	10-Ags-20	Jaja Jarkasih	Direktur	MUNAS Direktur Pemasaran BPDSI – ASBANDA
6	16-Okt-20	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Seminar ASBANDA/BPDSI “Penguatan Permodalan BPD”
7	25-27-Nov-20	Kemal Idris	Direktur	Diseminasi FIR on ML/TF
8	26-Nov-20	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
9	26-Nov-20	Kemal Idris	Direktur	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
10	03-Des-20	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Pertemuan Tahunan BI dan Arahan Presiden RI
11	07-Des-20	Fahmi Bagus Mahesa	Direktur Utama	Seminar Nasional & Kick Off Business 2021
12	07-Des-20	Jaja Jarkasih	Direktur	Seminar Nasional & Kick Off Business 2021
13	07-Des-20	Kemal Idris	Direktur	Seminar Nasional & Kick Off Business 2021

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko dilakukan oleh Perseroan untuk mengendalikan risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, evaluasi dan monitoring terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi dan dapat dimitigasi dan diminimalisir dengan baik.

Berkaitan dengan risiko yang terkait isu keberlanjutan, Perseroan telah mencanangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk melakukan *review* pedoman manajemen risiko lingkungan dan sosial yang akan mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial ke dalam aktivitas bisnis.

Dalam pengelolaan risiko peran organ tertinggi dalam Tata Kelola yaitu Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sangat penting. Dewan Komisaris dan Direksi berperan untuk melakukan pengawasan dan pemastian implementasi manajemen risiko yang mencakup identifikasi risiko, proses mitigasi risiko, dan evaluasi secara kontinu atas efektivitas manajemen risiko. Manajemen Risiko yang diawasi dan dikelola oleh Dewan Komisaris dan Direksi mencakup risiko yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. [102-30]

Jenis Risiko Perseroan & Mitigasi Risiko

Jenis risiko adalah pengelompokan potensi kerugian yang material, dan yang mungkin timbul dalam kegiatan atau area yang berbeda dalam Perseroan. Secara umum Perseroan mengidentifikasi beberapa risiko utama yang berpotensi memiliki dampak terhadap aktivitas operasional Perseroan.

Risiko-risiko yang dihadapi Perseroan antara lain adalah:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Pasar
4. Risiko Operasional
5. Risiko Kepatuhan
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Strategis

Risiko-risiko tersebut telah dikelola dengan baik dan telah dirumuskan langkah mitigasinya agar dampak yang timbul dapat terkendali.

Profil Risiko Tahun 2020

Adapun tabel profil risiko Bank per Desember 2020 (TW 4) adalah sebagai berikut:

Jenis Risiko	Penilaian Per Posisi		
	Peringkat Risiko Inheren	Marginal	Peringkat Tingkat Risiko
Kredit	Moderate To High	Satisfactory	Moderate To High
Pasar	Moderate	Fair	Moderate
Likuiditas	Moderate To High	Fair	Moderate To High
Operasional	Moderate	Fairy	Moderate
Hukum	Moderate	Fair	Moderate
Strategik	Moderate To High	Marginal	Moderate To High
Kepatuhan	High	Fair	Moderate To High
Reputasi	Moderate To High	Fair	Moderate To High
Peringkat Komposit	Moderate To High		

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (SPP) | WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Perseroan dalam menghindari adanya praktik kecurangan atau pelanggaran terhadap peraturan baik peraturan internal maupun regulasi yang berlaku adalah dengan menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) atau Sistem Pelaporan Pelanggaran. WBS merupakan bagian dari pengendalian internal Bank untuk mengurangi risiko terhadap adanya pelanggaran dan sebagai salah satu media pelaporan dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran etika dan hukum di lingkup Bank.

Peran WBS bertujuan untuk:

1. Mendorong seluruh pegawai berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran;
2. Mempermudah pihak-pihak terkait dalam menangani laporan pelanggaran;
3. Mengurangi kerugian, memperkuat sistem control internal serta meningkatkan reputasi Bank di mata Pemangku Kepentingan;
4. Meningkatkan iklim kerja yang lebih jujur, bersih, dan kondusif.

Untuk penerapan WBS, Perseroan telah memiliki Pedoman *Whistleblowing* dan membentuk Pengelola WBS. Laporan pelanggaran yang diterima pengelola WBS akan ditindaklanjuti dengan kegiatan investigasi.

Pegawai yang memberi laporan akan diidentifikasi terlebih dahulu keakuratannya, bila seluruh bukti sesuai, maka akan menjadi faktor penambah nilai dalam penilaian kinerja dan pegawai dapat diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat indikasi kuat adanya pelanggaran (*fraud*), maka hasil investigasi selanjutnya dibahas dalam rapat Komite Disiplin dalam rangka memberikan sanksi bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran (*fraud*). Untuk menjaga obyektivitas, pemberian sanksi kepada pegawai atau pelaku *fraud* tetap berpedoman pada Peraturan Perusahaan.

Perseroan juga melaporkan *fraud* yang terjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas kejadian *fraud* tersebut, Perseroan terus dan selalu melakukan evaluasi perbaikan terutama terhadap kelemahan aspek pengendalian internal.

Laporan pengaduan atas pelanggaran dapat disampaikan antara lain melalui:

1. Email kepada: direksi@bankbanten.co.id dan/atau laporkan@bankbanten.co.id; dan atau;
2. Surat kepada: Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk, Jl. Sudirman Lingkungan Kemang, Ruko Sembilan No. 04, 05 & 06, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Banten

KODE ETIK

Perseroan telah menyusun dan mengesahkan Kode Etik yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/SK/KOM-BB/VI/2020 dan Surat Keputusan Direksi No. 074/SK/DIR-BB/VI/2020, tanggal 29 Juni 2020 tentang Kebijakan Kode Etik (*Code of Conduct*) Bank Banten.

Pokok-pokok Isi Kode Etik

Ruang lingkup pedoman ini meliputi hubungan-hubungan insan Bank Banten dalam berperilaku terhadap *stakeholder* dan juga mengatur pedoman etika dan perilaku lingkungan internal dan eksternal.

Adapun isi dari Kode Etik Bank Banten, yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

1. Bekerja profesional dengan mengedepankan moralitas, patuh dan taat kepada peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu berpijak kepada nilai utama Bank serta menjunjung tinggi Kode Etik Bankir Indonesia;
2. Menjaga hubungan baik antar Insan Bank dalam hubungan kerja sama atau kompetisi di lingkungan internal dan/atau eksternal Bank;
3. Menjaga rahasia bank dan rahasia jabatan sesuai dengan kebijakan Bank dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak memanfaatkan data dan informasi tersebut untuk meraih keuntungan pribadi;
4. Menghindari pengambilan keputusan jika terdapat benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan Bank. Dalam hal kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan Bank maka akan mendahulukan kepentingan perusahaan;
5. Tidak melakukan tindakan penyimpangan, pelanggaran dan/atau *fraud* yang dapat merugikan keuangan maupun reputasi Bank;
6. Menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja termasuk menjaga aset dan harta Bank;
7. Melakukan pencatatan data, transaksi dan laporan secara jujur dan akurat;
8. Tidak menerima imbalan/ hadiah/ cinderamata dalam bentuk apapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya;
9. Tidak ikut serta dalam kegiatan organisasi yang mengakibatkan terjadinya perbenturan kepentingan;
10. Menggunakan fasilitas dan identitas Bank (*corporate identity*) semata-mata untuk kegiatan usaha Bank dan dilarang untuk menyalahgunakan *corporate identity* dimaksud untuk kepentingan pribadi.

Penegakan Kode Etik

Karyawan dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas implementasi Kode Etik Bank Banten kepada Pemimpin Unit Kerja atau mekanisme *whistleblowing system* melalui email: HCCARES@BANKBANTEN.CO.ID.

Upaya implementasi dan penegakkan Kode Etik Bank Banten dilakukan dengan penuh kesadaran secara berkelanjutan dalam bentuk komitmen, sikap dan perbuatan, yang dilakukan antara lain dengan:

1. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik Bank Banten. Insan Bank diharuskan membaca, memahami dengan baik serta diwajibkan menandatangani "Pernyataan Kepatuhan Insan Bank Banten terhadap Kode Etik".
2. Manajemen dan Seluruh Karyawan Bank. Komitmen Insan Bank untuk tidak menerima uang dan/atau barang gratifikasi dan/atau bingkisan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya dipublikasikan melalui media massa dan Situs Web Bank.
3. *Annual Disclosure* Benturan Kepentingan.
4. Insan Bank diharuskan membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait benturan kepentingan setiap tahun, dan setiap unit kerja diwajibkan menyampaikan laporan transaksi/ putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap triwulan.
5. Pakta Integritas. Pakta Integritas ditandatangani oleh karyawan pada seluruh level manajerial. Selain itu penandatanganan Pakta Integritas berupa Deklarasi *Anti-Fraud* dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi, serta Pejabat Eksekutif Bank.
6. Program *Awareness*.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Bank Banten dapat dikenai sanksi sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris yang terbukti melanggar Kode Etik Bank Banten akan dilaporkan ke pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Direksi yang terbukti melanggar Kode Etik Bank Banten dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Karyawan yang telah terbukti melanggar Kode Etik Bank Banten dapat dikenai sanksi sesuai dengan

peraturan perusahaan dan ketentuan yang berlaku, yang pada tingkat tertentu dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan atau tanpa surat peringatan terlebih dahulu;

4. Karyawan yang mengetahui pelanggaran dan/atau percobaan pelanggaran terhadap Kode Etik Bank Banten namun tidak melaporkannya, dianggap melanggar Kode Etik Bank Banten dan dapat dikenai sanksi/hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

BENTURAN KEPENTINGAN

Perseroan berpegang teguh pada prinsip integritas yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam lingkup Perseroan, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 091/SK/DIR-BB/XII/17. Setiap individu yang berada dalam lingkup Perseroan terutama yang masuk dalam struktur organisasi perusahaan wajib menghindari segala bentuk potensi konflik kepentingan ekonomi yang dapat merugikan Perseroan. Setiap individu juga

dilarang mengambil tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung. Setiap individu juga wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan. Kewenangan penyelesaian atas transaksi benturan kepentingan adalah pada RUPS pemegang saham independen sesuai dengan peraturan yang berlaku.



> KINERJA EKONOMI KEBERLANJUTAN

Perseroan terus melakukan ekspansi kredit, khususnya kredit produktif untuk membantu kesejahteraan masyarakat yang usahanya terdampak pandemi, sekaligus untuk menyeimbangkan portofolio kredit Bank.



TINJAUAN EKONOMI

Perekonomian global 2020 diwarnai oleh pandemi COVID-19 yang menimbulkan dampak luar biasa (*extraordinary*) terhadap kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan stabilitas sistem keuangan. Upaya kesehatan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 telah menyebabkan terbatasnya mobilitas dan kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan dan gelombang pertumbuhan ekonomi yang kontraktif di dunia. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,0% selama tahun 2020.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga dialami pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonomi Banten pada 2020 tercatat turun 3,38%, dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 5,29%. Bila dilihat secara triwulanan, ekonomi di provinsi ini masih tumbuh 3,18% pada triwulan I, lalu mengalami kontraksi sebesar 7,27% pada triwulan II. Pemulihan mulai terlihat pada triwulan III dan IV meski masih dalam tekanan dengan penurunan masing-masing sebesar 5,32% dan 3,92%.

Secara nominal, produk domestik regional bruto (PDRB) Banten pada triwulan IV tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai Rp626,44 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp441,30 triliun. Ditilik dari kontribusi produksi menurut lapangan usaha, sektor informasi dan komunikasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi yakni 0,55%, disusul oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,19%. Di sisi lain, sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi paling dalam dengan penurunan sebesar 1,84%, disusul oleh industri pengolahan yang turun 1,58%. Sementara itu, pengeluaran di semua lini mengalami kontraksi dengan penurunan terbesar dicatatkan oleh pengeluaran ekspor sebesar -4,64%. Konsumsi rumah tangga turun 1,15%, sedangkan konsumsi pemerintah turun 0,41%.

Distribusi PDRB Banten terhadap kelompok Provinsi se-Jawa pada triwulan IV tahun 2020 tercatat sebesar 6,82%. Untuk laju pertumbuhan, PDRB Banten pada periode yang sama (yoy) terpuuk paling dalam dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa.

KINERJA BANK BANTEN 2020

Dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi khususnya yang terjadi di Provinsi Banten selama tahun 2020 juga dialami cukup berat oleh Perseroan. Kinerja Perseroan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan yang terbaik tetap diupayakan melalui berbagai inisiatif strategis, terutama berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah untuk menekan NPL (*Non-Performing Loan*) dan meningkatkan kualitas kredit selama masa pandemi 2020.

Perseroan terus melakukan ekspansi kredit, khususnya kredit produktif untuk membantu kesejahteraan masyarakat yang usahanya terdampak pandemi, sekaligus untuk menyeimbangkan portofolio kredit Bank.

Pada tahun 2020, Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun Bank menurun 47,87% dibanding tahun sebelumnya, sebagai dampak dari menurunnya kredit sebesar 29,00% yang membuat aset Bank juga mengalami penurunan sebesar 34,09%. Jumlah kredit yang disalurkan Perseroan mencapai Rp3,79 triliun, turun Rp1,54 triliun (29,00%) dari tahun 2019 sebesar Rp5,33 triliun. Penurunan jumlah kredit yang disalurkan terjadi sehubungan dengan dampak dari pelemahan ekonomi yang menekan kredit konsumsi. Sementara DPK di tahun 2020 tercatat sebesar Rp2,43 triliun, menurun Rp2,23 triliun (47,87%) dibandingkan tahun sebelumnya Rp4,65 triliun.

Besaran NPL sebagai cerminan dari total kredit bermasalah yang dihadapi Perseroan juga masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan Bank Indonesia (sebesar kurang dari 5%). Tingkat kolektibilitas kredit masih terkendali dengan NPL bersih yang berada di level 4,51%, menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,01%. Restrukturisasi kredit banyak dilakukan karena semua sektor perekonomian juga mengalami masa yang cukup berat untuk bertahan di masa pandemi. Hal ini berdampak pada meningkatnya pencadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp821,58 miliar meningkat 574,14%. Peningkatan pencadangan penurunan nilai selain disebabkan oleh turunnya kolektibilitas kredit juga disebabkan adanya penerapan standar akuntansi terbaru terkait instrumen keuangan.

Perseroan membukukan pendapatan bersih di tahun 2020 sebesar Rp61,84 miliar yang terdiri dari pendapatan bunga bersih sebesar Rp33,74 miliar, pendapatan operasional lainnya sebesar Rp25,74 miliar, dan Pendapatan Non Operasional bersih sebesar Rp2,36 miliar. Jumlah pendapatan bersih menurun 52,42% dari pendapatan bersih di tahun 2019 sebesar Rp129,97 miliar.

Tabel Pertumbuhan Kinerja Ekonomi

Uraian	Dalam Jutaan Rupiah		
	2020	2019	2018
Total Aset	5.337.281	8.097.328	9.482.130
Dana Pihak ketiga	2.582.207	5.584.175	6.656.770
Kredit/Pembiayaan Bank	3.789.799	5.337.723	5.515.795
Pendapatan Bunga	372.209	553.871	571.662
Rugi Bersih	(308.158)	(137.559)	(100.131)

Rasio Kinerja	Dalam Persentase		
	2020	2019	2018
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)	34,75%	9,01%	10,04 %
NPL Gross	22,27%	5,01%	5,90 %
NPL Nett	4,51%	4,01%	4,92 %
Return on Asset (ROA)	-4,88%	-2,09%	-1,57 %
Return on Equity (ROE)	-47,96%	-60,79%	-26,77 %
Net Interest Margin (NIM)	0,56%	1,14%	1,96 %
Rasio Efisiensi (BOPO)	164,90%	129,22%	121,97 %
Loan to Deposit Ratio (LDR)	146,77%	95,59%	82,86 %

DISTRIBUSI NILAI EKONOMI [201-1]

Pendekatan Manajemen [103-1], [103-2], [103-3]

Perseroan memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis di dalam proses dan pada tingkatan pengambilan kebijakan maupun pengambilan keputusan yang dapat mendorong kesuksesan Perseroan dengan tetap berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perusahaan menjalankan strategi bisnis yang mengintegrasikan strategi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan Perseroan dapat mendistribusikan nilai ekonomi maksimal kepada pemangku kepentingan, baik itu nasabah, pegawai, pemerintah pemasok, maupun masyarakat.

TINJAUAN EKONOMI

Selama tahun 2020, Perseroan menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp395.584 juta menurun 35,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari nilai ekonomi yang dihasilkan tersebut, sejumlah Rp359.078 juta didistribusikan kepada pemangku kepentingan, termasuk pegawai, pemerintah, pemegang saham, maupun masyarakat melalui penyaluran dana CSR. Nilai ekonomi yang didistribusikan oleh Perseroan mencapai 226,60% dari nilai ekonomi yang dihasilkan. Nilai ekonomi yang ditahan oleh Perseroan adalah sebesar minus Rp500.793 juta, meningkat 2,49% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar minus Rp513.581 juta.

Perhitungan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan oleh Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan, Dalam jutaan Rupiah [201-1]

Uraian	2020	2019
Nilai Ekonomi Langsung Yang Dihasilkan		
Pendapatan Bunga	372.209	553.871
Pendapatan Operasi Lainnya	25.737	56.500
Pendapatan Non Operasional	(2.362)	-622
Jumlah Nilai Ekonomi Langsung Yang Dihasilkan Total Direct Economic Value Generated	395.584	609.749
Nilai Ekonomi yang Didistribusikan		
Beban bunga	(338.465)	(481.024)
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan - bersih	23.199	763
Beban Operasional Lainnya di luar biaya pegawai	(175.635)	(179.262)
Tenaga Kerja dan Tunjangan	119.005	129.400
Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham	0	0
Pengeluaran untuk pemerintah (pajak, retribusi, dan lain-lain)	239.968	332.593
Pengeluaran kepada masyarakat: CSR	105	288
Jumlah Nilai Ekonomi Didistribusikan	896.377	1.123.330
Nilai Ekonomi Ditahan	(500.793)	(513.581)

INKLUSI KEUANGAN DAN KEGIATAN USAHA BANK BANTEN YANG SESUAI DENGAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Pendapatan yang rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, penyandang disabilitas, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran yang terkendala geografis, tidak adanya agunan, maupun rendahnya literasi keuangan membuat akses layanan keuangan tidak dapat menjangkau mereka. Oleh karena itu, Perseroan secara konsisten berusaha untuk melakukan sosialisasi dan inovasi-inovasi untuk meningkatkan literasi keuangan dan menjalankan program inklusi keuangan.

Perseroan mendukung penuh upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan. Karena selain menjadi potensi pasar baru bagi perbankan, peningkatan

inklusi keuangan juga efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mempersempit kesenjangan bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan keuangan. Hingga akhir tahun 2020, program inklusi keuangan Perseroan mencapai 20%. Program inklusi keuangan Bank meliputi layanan digital Bank (Laku Pandai) dan penyediaan dana murah bagi masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan.

atau UKL/UPL. Selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, debitur juga dipastikan tidak melanggar ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan penyaluran kredit ramah lingkungan di masa mendatang. Bank menyadari bahwa peran lembaga keuangan dalam mendukung keuangan berkelanjutan sangat penting.

Tabel Transaksi Bank Banten

Keterangan	2020		2019	
	Jumlah Transaksi	Komposisi	Jumlah Transaksi	Komposisi
Transaksi Digital	156.630	4,47	1.413.058	16,30
Transaksi ATM	2.916.658	83,29	6.397.087	73,78
Transaksi Teller	428.640	12,24	860.181	9,92
Jumlah	3.501.928	100%	8.670.326	100%

Dapat diinformasikan perihal dana murah bagi masyarakat yang disalurkan dalam bentuk kredit pembiayaan produktif dan konsumtif di Perseroan. Pembiayaan kredit produktif meliputi kredit UMKM dan Kredit Komersial yang diperuntukkan bagi perorangan dan non perorangan. Nilai kredit produktif pada tahun 2020 sebesar Rp. 537 Miliar, mengalami penurunan sebesar Rp. 36 Miliar dari tahun 2019, dimana pada tahun 2019 kredit produktif sebesar Rp. 573 Miliar.

Kemudian pembiayaan konsumtif meliputi kredit konsumen yang diperuntukkan bagi pegawai aktif dan pensiunan. Nilai kredit konsumtif pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.579 Triliun, mengalami penurunan sebesar Rp. 1.354 Triliun, dimana pada tahun 2019 kredit yang disalurkan sebesar Rp. 2.933 Triliun.

Terjadi penurunan nilai kredit yang disalurkan baik kredit produktif maupun kredit konsumtif pada tahun 2020. Penurunan penyaluran kredit disebabkan keterbatasan ruang gerak penyaluran kredit sehingga Perseroan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit untuk menjaga kualitas kredit.

Dalam hal implementasi portofolio produk hijau, Perseroan mensyaratkan adanya ketentuan untuk menyerahkan perizinan, antara lain dokumen IPAL

IMPLIKASI FINANSIAL, RISIKO DAN PELUANG KARENA PERUBAHAN IKLIM

Pendekatan Manajemen [103-1], [103-2], [103-3]

Sebagai Bank pembangunan Daerah, Perseroan memosisikan diri untuk berkontribusi secara optimal didalam menghadapi kompleksnya isu-isu lingkungan dan sosial.

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk mencegah atau meminimalisi dampak perubahan iklim, maka peluang pembiayaan proyek-proyek *clean energy* dan/atau *renewable energy* maupun *green project* juga akan semakin tinggi. Untuk itu, Perseroan juga akan mulai mengidentifikasi dan membuka peluang bagi pendanaan hijau (*green project*) kepada debitur yang telah memiliki hasil kajian lingkungan. [201-2]

TINJAUAN EKONOMI

BANTUAN FINANSIAL YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH

Pendekatan Manajemen [103-1], [103-2], [103-3]

Pada 2020, sebagai Bank Daerah, Perseroan memperoleh bantuan finansial dalam bentuk tambahan modal sebesar Rp1,58 triliun. Selain setoran modal tersebut, Perseroan tidak menerima bantuan finansial lain dari pemerintah. [103-2, 103-3, 201-4]

RASIO UPAH KARYAWAN MENURUT GENDER TERHADAP UPAH MINIMUM REGIONAL/PROVINSI

Pendekatan Manajemen [103-1], [103-2], [103-3]

Perseroan berkomitmen memenuhi kesejahteraan para pekerja. Kebijakan remunerasi dan benefit bagi pekerja, yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penyesuaian gaji berkala kepada seluruh pegawai tetap berdasarkan kinerja dan dilakukan penyesuaian gaji bagi tenaga kontrak dan calon pegawai menyesuaikan dengan upah minimum regional (UMR). Kebijakan remunerasi didasarkan pada kompetensi, pengalaman, dan kinerja pegawai. Semakin baik kinerja, kompetensi, prestasi, serta tanggung jawab yang diemban oleh pegawai, maka semakin tinggi pula kompensasi serta tunjangan yang akan diterima.

Perseroan senantiasa taat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upah atau gaji karyawan, termasuk ketentuan mengenai Upah Minimum Regional/Provinsi. Ihtwal besaran upah, Bank Banten tidak membedakan berdasarkan gender atau jenis kelamin. Dalam hal ini, Bank Banten memberikan gaji pegawai pemula selalu di atas UMR. [202-1]

Sehingga, Perseroan memiliki perbandingan rata-rata Upah Karyawan Baru Tingkat Terendah dengan UMR 2020 sebesar 102,44%.

$$\frac{\text{UMR 2021}}{\text{UMR 2020}} \times 100 = \frac{2.004.000}{1.956.200} \times 100 = 102.44\%$$

DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG

Pendekatan Manajemen [103-1], [103-2], [103-3]

Perseroan berusaha untuk berperan serta dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang telah menjadi resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa sejak tahun 2015. Berbagai kegiatan CSR diselenggarakan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat dalam rangka terjalinnya hubungan antara Perseroan dengan masyarakat luas yang serasi, mengembangkan ekonomi dan komunitas lokal yang seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya.

Selama tahun 2020, Perseroan memberikan dampak ekonomi tidak langsung kepada masyarakat melalui investasi infrastruktur pada pembangunan sarana peribadatan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum. [203-1]

Adapun dana CSR yang dikeluarkan Perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp104,54 juta. Dana CSR tersebut digunakan untuk memberikan dampak ekonomi tidak langsung kepada masyarakat secara signifikan melalui program-program CSR Bank.

Berikut tabel untuk jumlah kegiatan CSR Bank Banten tahun 2020. [203-2]

Tabel Dana CSR Bank Banten tahun 2020

No	Bidang	Nama Kegiatan	Tanggal			
1	Bencana Alam	Penyerahan obat-obatan kepada Korban Banjir	3 Januari 2020			
2	Keagamaan	Pembangunan Masjid Pondok Pesantren Kaung Acaang	17 Januari 2020			
3	Bencana Alam	Penyerahan (Sembako), Pakaian Seragam (SD), dan Peralat Ibadah berupa Al- Quran dan Sajadah.	24 Januari 2020			
4	Keagamaan	Pembangunan Masjid Nurrahman	27 Januari 2020			
5	Keagamaan	Bantuan Kegiatan Isra Mi'raj	18 Maret 2020			
6	Kesehatan	Pembagian APD dan Unit Viral Transport Medium (VTM)	26 Maret 2020			
7	Keagamaan	Pencetakan Jadwal Puasa & Imsak	17 April 2020	NU Kota Tangsel	Kota Tangerang Selatan	1,000,000
8	Keagamaan	Bantuan Pembangunan Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Al-mustofa	9 Juli 2020	Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Al-mustofa	Kab. Sumedang	2,000,000
Total Bantuan						104.536.228





07

> KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN

Sebagai Lembaga Jasa Keuangan, Perseroan menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana. Oleh karena itu, Perseroan memiliki kebijakan pemberian kredit. Perseroan hanya menyalurkan kredit kepada sektor industri dengan prospek yang baik, membatasi penyaluran kredit pada sektor industri yang memiliki ketergantungan sangat tinggi pada konsisi alam, serta menghindari penyaluran kredit untuk proyek usaha yang membahayakan lingkungan.



KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN

Pendekatan Manajemen [103-1], [103-2], [103-3]

Keuangan Berkelanjutan mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam kegiatan lembaga jasa keuangan sebagai dukungan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai Lembaga Jasa Keuangan, Perseroan menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana, meratanya kesejahteraan sosial serta sistem keuangan yang tumbuh baik. Oleh karena itu, Perseroan memiliki kebijakan pemberian kredit. Perseroan hanya menyalurkan kredit kepada sektor industri dengan prospek yang baik, membatasi penyaluran kredit pada sektor industri yang memiliki ketergantungan sangat tinggi pada konsisi alam, serta menghindari penyaluran kredit untuk proyek usaha yang membahayakan lingkungan berdasarkan prinsip AMDAL yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Menciptakan Green Office

Perseroan senantiasa berusaha untuk menerapkan kebijakan *green office* yang mengaplikasikan gaya hidup ramah lingkungan sebagai budaya Perusahaan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja ramah lingkungan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Kebijakan *green office* juga menjadi bentuk kepedulian Perseroan terhadap pelestarian lingkungan.

Penghematan Kertas

Dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan, Perseroan menargetkan pengurangan emisi seperti pengurangan penggunaan air minum dalam kemasan yang dapat menghasilkan limbah plastik dan efisiensi penggunaan dokumen fisik berbahan kertas dalam rangka menjaga keberlangsungan bahan baku kertas.

Saat ini, Perseroan sudah tidak menggunakan Air Minum Dalam Kemasan di setiap kegiatan. Penggunaan Kertas dari tahun sebelumnya juga mengalami pengurangan dengan adanya sistem *daring*. Tujuan pelaksanaan penggunaan yang bertanggung jawab ini adalah untuk menjaga keberlangsungan lingkungan untuk memberikan dampak yang baik terhadap perubahan lingkungan.

Hingga akhir tahun 2020, volume penggunaan kertas Perseroan adalah sebanyak 624 rim, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.060 rim kertas. Penurunan kertas ini merupakan kontribusi nyata Perseroan dalam menjaga lingkungan, dimana Perseroan berkontribusi dalam menghemat 436 pohon yang tidak ditebang untuk dijadikan bahan baku kertas. (Asumsi 1 rim kertas = 1 pohon berusia tahun). Diharapkan, perilaku yang bertanggung jawab ini dapat menciptakan budaya kepedulian terhadap sekitar dan lingkungan.

Tabel Penggunaan Kertas

Target	kWh/ Tahun		Menghemat Pohon	%
	2020	2019		
Kop Surat	63	120	57	-48%
Kertas	561	940	379	-40%
*Rim	624	1.060	436	-41%

Efisiensi Energi

Perseroan telah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan energi. Hal ini sejalan dengan upaya Perseroan dalam melaksanakan operasi bank yang ramah lingkungan. Hingga akhir tahun 2020, Perseroan belum menggunakan sumber daya terbarukan. Ke depan, Perseroan akan terus melakukan kajian yang tepat terhadap penggunaan sumber daya terbarukan, sejalan dengan komitmen Perseroan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. [302-1]

Sejalan dengan kebijakan *Green Office*, Perseroan melakukan upaya penghematan energi, di antaranya: [302-4]

1. Memadamkan peralatan listrik yang tidak digunakan diluar jam kerja
2. Menggunakan kendaraan hemat bahan bakar
3. Menggunakan instalansi listrik hemat energi (jenis lampu LED, *zoning*, dan instalasi kedudukan lampu).

Selain itu, Perseroan juga melakukan sosialisasi dengan mendistribusikan poster gerakan hemat energi dan penempelan stiker penghematan di lokasi tertentu, serta melakukan kampanye gerakan penghematan energi.

Selama tahun 2020, total pemakaian listrik di Perseroan mencapai 2.459.307 kWh. Jumlah tersebut berkurang 433.463 kWh atau 15% dibanding tahun 2019 yang sebesar 2.892.770 kWh.

Tabel Konsumsi Energi Berdasarkan Sumber [302-1]

Deskripsi	Satuan	2020	2019
Pemakaian Listrik	kWh	2.459.307	2.892.770
	Gj	8.853,51	10.413,97

Air

Perseroan memahami pentingnya pemakaian air secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya penghematan air dilakukan melalui kampanye hemat air di seluruh kantor-kantor Perseroan. Namun, Perseroan belum mengkalkulasi air yang di-*recycle*. [303-2, 303-3]

KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN

Penggunaan terbesar air di bank adalah untuk kebutuhan domestik dan sanitasi/kebersihan. Hingga akhir tahun 2020, sumber air yang digunakan, khususnya di kantor pusat Perseroan berasal dari PDAM. [303-1, 303-2]

Perseroan terus berupaya untuk melakukan penghematan air secara konsisten dan berkesinambungan. Selama tahun 2020, total pemakaian air di Perseroan mencapai 159.203.935 m³. Jumlah tersebut berkurang 30.214.764 m³ atau 16% dibanding tahun 2019 yang sebesar 189.418.699 m³. Berikut adalah konsumsi air berdasarkan sumbernya: [303-1]

Tabel Konsumsi Air

	Satuan	2020	2019
Penggunaan Air	Meter Kubik	159.203.935	189.418.699

Pengelolaan Limbah

Dalam operasionalnya, Perseroan juga menghasilkan limbah, khususnya limbah domestik, terutama berupa limbah padat seperti kertas, alat tulis dan sampah plastik. Untuk penanganan limbah tersebut, Perseroan menggunakan jasa pihak ketiga, dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan Pemerintah Kabupaten dan Kota dimana lokasi kantor Bank berada. Sedangkan pengelolaan limbah cair yang tidak termasuk ke dalam kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun seperti air kotor menggunakan sistem *septic tank* yang kemudian diangkut dan dikelola menggunakan jasa pihak ketiga. [306-2]

Kepatuhan Lingkungan

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan di setiap operasionalnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen ini merupakan dukungan Perseroan pada pencapaian SDGs.

Dengan penerapan komitmen tersebut, hingga akhir tahun 2020 Perseroan tidak menerima pengaduan dari masyarakat maupun *stakeholder* lainnya mengenai permasalahan lingkungan sehingga tidak terdapat sanksi maupun denda terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan. [307-1]





> KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

Sebagai pelaku industri keuangan perbankan dewasa ini menjadi salah satu penggerak roda perekonomian, fungsinya pada era sekarang telah bergeser tidak hanya pada aspek ekonomi, melainkan tanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan yang berkesinambungan sehingga menciptakan keberlanjutan tatanan sosial yang berorientasi pada lingkungan secara luas. Perseroan berupaya memberikan kinerja terbaik untuk menjadi “Bank Kebanggaan Masyarakat Banten” dengan berkontribusi terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan di wilayah Provinsi Banten.



KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

Menjadi Perbankan yang Berkelanjutan, Berdampak Positif bagi Karyawan, Nasabah, maupun Masyarakat

Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memperhatikan kebutuhan dari para nasabah, karyawan, maupun masyarakat. Bagi bank, berdasarkan identifikasi pemangku kepentingan, nasabah, karyawan, dan masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang sangat signifikan.

Untuk nasabah, Perseroan berupaya untuk terus meningkatkan kepuasan nasabah yang antara lain dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perseroan juga terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui penerapan pelayanan prima, termasuk dengan menyediakan produk-produk digital.

Sedangkan untuk karyawan, Perseroan berkomitmen untuk memenuhi hak-hak normatif karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan itu, Perseroan juga melakukan program pengembangan kompetensi dan kapasitas karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan. Selain itu, Perseroan juga memperhatikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk menjadikan Perseroan sebagai tempat kerja pilihan bagi warga Provinsi Banten dan sekitarnya.

Sementara bagi masyarakat, Perseroan menjalankan kegiatan CSR secara berkesinambungan dengan menyediakan anggaran yang cukup. Komitmen Bank dalam menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan juga didasari pada ketaatan perusahaan terhadap peraturan.

Komitmen Bank terhadap Pengembangan SDM

Perseroan memandang Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu pemangku kepentingan dengan kedudukan sentral sebagai ujung tombak dan penentu keberhasilan Perseroan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misinya. Sebagai mitra strategis, Perseroan mengelola SDM dengan melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM.

Selain itu, Perseroan juga selalu berupaya untuk memenuhi hak-hak karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perseroan juga memprioritaskan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi karyawan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pada tahun 2020, jumlah karyawan Perseroan mencapai 950 orang. Karyawan tersebut memiliki pendidikan, usia, jenis kelamin, dan latar belakang yang beragam. Jumlah ini mengalami penurunan 3,26% atau berkurang 32 orang dari tahun 2019 sebanyak 982 orang.

Rekrutmen dan Perputaran Karyawan

Dalam melakukan rekrutmen, Perseroan berkomitmen untuk bersifat terbuka tanpa diskriminasi bagi setiap orang selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Semua calon pegawai mendapatkan perlakuan yang sama yakni harus melalui proses seleksi yang sama. Perseroan juga membuka peluang yang sama untuk penduduk lokal untuk mengisi berbagai posisi yang dibutuhkan. [103-2]

Proses rekrutmen dapat berasal dari internal maupun eksternal Perseroan. Dari internal, proses rekrutmen dilakukan melalui promosi, rotasi, dan demosi. Sedangkan dari eksternal, proses rekrutmen dilaksanakan melalui proses seleksi *fresh graduate* maupun tenaga ahli/profesional. [103-2]

Berdasarkan proses rekrutmen pada tahun 2020, Perseroan berhasil menjaring karyawan baru sebanyak 42 orang. Pemenuhan kebutuhan jumlah SDM ini didasarkan pada perencanaan tenaga kerja sesuai dengan estimasi perhitungan jumlah karyawan pensiun, pergantian karyawan, dan ekspansi jaringan usaha. Berdasarkan penambahan dan pengurangan karyawan tersebut, Bank bisa menghitung tingkat perputaran (*turnover*) pegawai pada tahun pelaporan. [103-1, 401-1]

KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

Untuk kandidat yang lolos rekrutmen, mereka akan menjalani mekanisme kepegawaian selanjutnya sehingga tiba saatnya menjadi pegawai tetap bagi yang memenuhi persyaratan. Untuk pegawai tetap baru, Perseroan memberikan upah minimal sama (1:1) dengan Upah Minimum Regional di tempat pegawai tersebut bekerja. [6.c.2) b)]

Selain ada penambahan karyawan baru, karyawan Perseroan pada tahun 2020 mengalami pengurangan karena adanya karyawan yang meninggalkan Bank dengan berbagai alasan yang dibenarkan undang-undang (*turnover*). Pada tahun pelaporan, jumlah karyawan yang berhenti tercatat sebanyak 74 orang. Komposisi karyawan yang meninggalkan karyawan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: [103-3, 401-1]

Perputaran Pegawai (Pegawai Masuk dan Keluar) [103-1, 401-1]

Perputaran Pegawai	2020	2019
Masuk	42	100
Keluar	74	169
Total	116	269

Perputaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin [103-1, 401-1]

Jenis Kelamin	2020	2019
Laki-laki	23	69
Perempuan	51	100
Total	74	169

Keberagaman, Kesetaraan Kesempatan Kerja, dan Non-Diskriminasi [405, 406]

Perseroan menyadari bahwa keberagaman merupakan hal yang patut dihargai. Perseroan selalu menghormati adanya perbedaan ragam suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, pendapat politik, keturunan, pendidikan, dan asal-usul sosial. Pengangkatan calon pekerja didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada

masa percobaan dan orientasi pekerja. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pegawai, baik pria dan wanita, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen pekerja. [103-1, 103-2]

Jumlah pegawai wanita Perseroan per 31 Desember 2020 adalah 377 orang atau sebesar 39,68% dari jumlah keseluruhan pegawai Bank. Persentase ini menunjukkan bahwa Perusahaan tidak memandang perbedaan gender, terutama dalam hal pegawai yang memegang jabatan kunci di Perusahaan. Selain itu, dalam hal remunerasi, tidak terdapat perbedaan antara gaji dasar karyawan laki-laki dan perempuan dengan golongan yang sama. [6.c.2)a), 405-1, 405-2]

Selain itu, dalam mengelola sumber dayanya Perseroan tidak pernah melakukan diskriminasi kepada para karyawannya. Proses seleksi dan penilaian kinerja karyawan selalu didasarkan oleh kebutuhan, kapabilitas, dan kinerja masing-masing individu karyawan Perseroan. Selama tahun pelaporan, tidak terdapat insiden diskriminasi terhadap karyawan. Oleh karena nihil kasus, maka tidak ada remediasi yang sedang maupun telah diterapkan. [103-3, 6.c.2)a), 406-1]

KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

Tunjangan dan Kesejahteraan Pegawai

Kebijakan remunerasi karyawan Perseroan didasarkan pada posisi, masa kerja, dan pencapaian kinerja, tanpa diskriminasi. Perseroan menetapkan struktur pengupahan dan skala pengupahannya sesuai dengan aturan, dan mengevaluasinya secara berkala, tanpa membedakan gender. Perseroan juga memastikan remunerasi dan tunjangan diberikan kepada seluruh karyawan, baik tetap maupun tidak tetap, terdiri dari gaji, tunjangan, cuti dan asuransi.

Pegawai Perseroan dibedakan menjadi tiga kelompok besar berdasarkan statusnya, yaitu pegawai tetap, tidak tetap (kontrak) dan probation. Selain berbeda dari segi dan jenis pekerjaan, perbedaan status tersebut berpengaruh pula terhadap jenis tunjangan yang diterima pegawai.

Kebijakan remunerasi yang ditempuh Perusahaan dilakukan dengan:

1. Mengembangkan sistem remunerasi yang berbasis pencapaian kinerja (merit system) yang terdiri dari remunerasi yang bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat variabel.
2. Menyesuaikan kebijakan remunerasi dengan tetap memperhatikan rasio BTK terhadap pencapaian bisnis sesuai dengan standar dan strategi yang telah ditetapkan Perseroan.
3. Menerapkan upah minimum karyawan yang berlaku di tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Meninjau dan menyesuaikan Kembali kebijakan remunerasi yang berlaku saat ini sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang paling sedikit memuat:
 - a. Struktur remunerasi: Skala Remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan
 - b. Komponen remunerasi: Metode dan mekanisme penetapan remunerasi.

Cuti Melahirkan

Perseroan menghargai berbagai hak yang dimiliki karyawan dan telah mengaturnya sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Di antara hak-hak itu adalah Istirahat Bersalin bagi pegawai

perempuan. Dengan memberikan hak tersebut, Perseroan memberikan kesempatan kepada pekerja tersebut agar bisa menyiapkan kelahiran anaknya dengan baik.

Hak Istirahat Bersalin di Perseroan adalah 3 (tiga) bulan, yakni 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saat melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan Dokter Kandungan atau Bidan. Sementara itu, pegawai perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan setelah peristiwa keguguran sesuai dengan surat keterangan Dokter Kandungan atau Bidan. Ketentuan tentang Istirahat Bersalin tersebut merujuk Pasal 82 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu, untuk pekerja pria yang istrinya melahirkan, Perusahaan memberikan Izin Tidak Bekerja Khusus selama 1 (satu) hari. Pemberian izin khusus diberikan agar bisa mendampingi istrinya untuk menyiapkan proses kelahiran dengan baik. [103-1, 103-2]

Sesuai dengan ketentuan Istirahat Bersalin di atas, selama tahun 2020, jumlah pekerja perempuan yang berhak mengajukan Istirahat Bersalin ada sebanyak 213 orang. Dari jumlah itu, semuanya atau 100% mengambil haknya. [103-3, 401-3]

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Untuk menciptakan dan menjamin lingkungan kerja yang layak dan aman, Perseroan memenuhi hak-hak karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13/2003. Selain itu, Perseroan berkomitmen untuk menjaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi karyawannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Republik Indonesia Nomor 1/1970, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.5/1996 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Perseroan telah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup karyawan. Perseroan menyediakan lingkungan kerja yang layak, aman dan nyaman bagi karyawannya, antara

KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

lain toilet bersih, ruang pantry, alat pendeteksi asap, alat pemadam kebakaran, tempat ibadah, dan tempat parkir kendaraan. Perseroan akan terus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman serta hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dengan seluruh karyawan. Sebagai salah satu langkah pencegahan kecelakaan kerja di ruangan kantor, Perseroan senantiasa memberikan sosialisasi terkait penggunaan peralatan kerja secara aman. Misalnya, penggunaan peralatan listrik yang standar dari perusahaan, serta selalu mematikan komputer dan alat listrik lain apabila tidak dipergunakan. [302-4]

Perseroan selalu berupaya menjamin kesehatan dan keselamatan Pegawai pada saat bekerja. Dalam hal kesehatan Pegawai dan keluarganya, Perseroan mendaftarkan pegawainya kepada BPJS Kesehatan yang sifatnya mandatory. Selain itu, Perseroan juga memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bekerja sama dengan beberapa Rumah Sakit dan Laboratorium dengan benefit atau manfaat rawat inap, rawat jalan, rawat gigi, kacamata dan melahirkan. [103-2]

Upaya sungguh-sungguh Perseroan serta dukungan dari seluruh pegawai dalam mewujudkan tempat kerja terbaik, yang aman dan nyaman, yang ditandai dengan terpenuhinya K3 di lingkungan Perseroan, membawa hasil dengan tidak adanya kecelakaan kerja (*zero accident*) selama tahun 2020. [103-3]

Pengembangan Kompetensi

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA
1	PELATIHAN AO KONSUMER & ADM KREDIT WEB FLAGGING TASPEN	72
2	PELATIHAN AUDIT & FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KONTROL INTERNAL CABANG	27
3	GROOMING & BEAUTYCLASS BATCH 1	60
4	PELATIHAN GRAFONOMI & GRAFOLOGI BATCH 1	60
5	PELATIHAN GRAFONOMI & GRAFOLOGI BATCH 2	34
6	PELATIHAN GRAFONOMI & GRAFOLOGI BATCH 3	62
7	SHARING SESSION MITIGASI RISIKO - KC BANDUNG ASTANA ANYAR	21
8	WORKSHOP DYNAMIC ASSET LIABILITY MANAGEMENT	1

Perseroan membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni agar kinerja dan target-target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis yang dapat dicapai bank. Untuk itu, selain merekrut kandidat-kandidat terbaik, Perseroan secara terus-menerus melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar mampu menjawab tantangan bisnis perusahaan yang dinamis di masa depan. [103-1, 103-2]

Program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara internal dan eksternal serta disusun untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dampak dan tujuan pembelajaran. Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan untuk maju dan berkembang berdasarkan potensi, keahlian, dan peluang yang tersedia. Perseroan juga melakukan pendidikan dan pelatihan untuk materi yang terkait dengan keuangan berkelanjutan. Selama tahun 2020, Perseroan telah menyelenggarakan 100 pelatihan umum yang menjangkau 2.574 karyawan, 6 pelatihan khusus yang menjangkau 79 karyawan, yang juga mencakup kegiatan sertifikasi profesi dengan 9 orang peserta dan 70 refreshment. Rata-rata jumlah jam pelatihan adalah 16,8 jam per karyawan. [404-1]

Adapun pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Perseroan sebagai sarana pengembangan kompetensi pegawai selama tahun 2020 adalah sebagai berikut: [103-3, 404-1, 404-2]

KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA
9	PELATIHAN PERBANKAN SYARIAH	5
10	SHARING SESSION MITIGASI RISIKO - KC DENPASAR	22
11	PERSIAPAN SPT TAHUNAN PPH BADAN TAHUN 2019	1
12	FKDK BPDSI WORKSHOP & FOCUSS GROUP DISSCUSION PALANGKARAYA	3
13	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC SOLO	22
14	WORKSHOP REMUNERASI & KOMPENSASI	2
15	CERTIFIED HUMAN RESOURCES PERFORMANCE & DEVELOPMENT (CHRPD)	15
16	E-LEARNING BERBASIS SCORM	1
17	BREVET AB (TAX)	1
18	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC DENPASAR	22
19	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC YOGYAKARTA	20
20	IMPLEMENTASI MITIGASI RISIKO OLEH THREE LINE OF DEFENCE	27
21	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC BANDUNG	21
22	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC PALEMBANG	28
23	SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN CABANG PALEMBANG	28
24	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC TASIKMALAYA	19
25	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC SERANG, KC RANGKABITUNG, KC PANDEGLANG	78
26	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC MEDAN	27
27	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC TANGERANG	56
28	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC SEMARANG	23
29	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC BEKASI & KARAWANG	37
30	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC PEKANBARU	20
31	SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN CABANG PEKANBARU	20
32	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC SURABAYA	21
33	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC LAMPUNG	20

KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA
34	SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN CABANG BALARAJA & KOTABUMI	42
35	PRESENTATION SKILL BY ICSA	2
36	SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN CABANG PONDOK INDAH	23
37	BANK INDONESIA - SOSIALISASI & WORKSHOP PETUGAS KLIRING BI - KC PALEMBANG	1
38	SEMINAR NASIONAL BPDSI & PENARIKAN UNDIAN SIMPEDA	2
39	STUDY VISIT PETUGAS KLIRING - KC MANADO	1
40	SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN CABANG DENPASAR	22
41	PELATIHAN MANAJEMEN ASET BERBASIS TEKNOLOGI	2
42	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC MALANG	21
43	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC MANADO	23
44	ASBANDA - CEO MEETING BPDSI	2
45	PENAMBAHAN PETUGAS KLIRING KC LAMPUNG	1
46	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC SANGAJI	51
47	SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN (PP) KC MALANG	21
48	SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN (PP) KC SURABAYA	21
49	INTERMEDIATE MARKET & LIQUIDITY RISK	18
50	KONSINYERING CMO-PROGRAM TRANSFORMASI BPDSI SE-INDONESIA	2
51	SHORTCOURSE PENULISAN JURNALISTIK MEDIA ONLINE	1
52	KEGIATAN OPERASIONAL SKNBI DAN IKPB - BANDUNG	2
53	VALUE CREATION STRATEGIC IN MARKET PENETRATION AND SELLING BUSINESS AREA STRATEGIC KC MAKASSAR	22
54	VALUE CREATION STRATEGIC IN MARKET PENETRATION AND SELLING BUSINESS AREA STRATEGIC KC MANADO	23
55	PELATIHAN BISNIS KONSUMER CABANG TERHADAP PRODUK PENSIUN KC MAKASSAR	22
56	PELATIHAN PENYUSUNAN/PENKINIAN PEDOMAN DEKOM & DIREKSI - PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PENILAIAN KERJA & PEMBERIAN REMUNERASI	7
57	FGD LAYANAN PERKASAN SEMESTER 1 - KC SOLO	1
58	PELATIHAN BUSINESS DEVELOPMENT DALAM PERBANKAN	1
59	E-LEARNING ASBANDA UNTUK STAFF FRONTLINER	98
60	SOSIALISASI APLIKASI RISK CONTROL SELF ASSESSMENT(RCSA) & LOSS EVENT DATABASE(LED)	46

KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA
61	PELATIHAN LEADERSHIP FOR ACHIEVING HIGH PERFORMANCE	14
62	EXTRAORDINARY MANAGEMENT KEARSIPAN BERBASIS TEKNOLOGI DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0	16
63	ZOOM MEETING WEBINAR MERGER & AKUISISI MASALAH -MASALAH HUKUM	3
64	WEBINAR DIGITAL SIGNATURE PADA PERJANJIAN KREDIT/PEMBIAYAAN	4
65	WORKSHOP PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG PENGUPAHAN	2
66	PELATIHAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BATCH 4 TAHUN 2020	1
67	WEBINAR PEMAHAMAN KETENTUAN PELAPORAN DATA PENJAMIN SIMPANAN BERBASIS NASABAH (SINGLE CUSTOMER VIEW)	3
68	BUDAYA KEPATUHAN DAN APU - PPT TAHUN 2020 MELALUI ZOOM (TELECONFERENCE) BATCH 1	55
69	BUDAYA KEPATUHAN DAN APU - PPT TAHUN 2020 MELALUI ZOOM (TELECONFERENCE) BATCH 2	56
70	BUDAYA KEPATUHAN DAN APU - PPT TAHUN 2020 MELALUI ZOOM (TELECONFERENCE) BATCH 3	62
71	BUDAYA KEPATUHAN DAN APU - PPT TAHUN 2020 MELALUI ZOOM (TELECONFERENCE) BATCH 4	67
72	DIGITALIZATION AND AUTOMATIZATION CURRENCY MANAGEMENT	1
73	RAPAT VIRTUAL PELAKSANAAN PENUKARAN UANG PERINGATAN KEMERDEKAAN 75 TAHUN RI	1
74	RAPAT VIRTUAL PELAKSANAAN PENGEDARAN UPK 75 TAHUN RI SECARA KOLEKTIF	1
75	PENGEMBANGAN APLIKASI BOS NON TUNAI DENGAN SIPLAH	2
76	FOCUS GROUP DISCUSSION - ASBANDA	3
77	WEBINAR TANTANGAN CORPORATE SECRETARY DALAM MENGHADAPI PANDEMI	1
78	REFRESHMENT SOSIALISASI E-DABU - BPJS KESEHATAN	2
79	SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN PERIODE 2020-2022 KC SOLO	18
80	SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN PERIODE 2020-2022 KC YOGYAKARTA	14
81	SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN PERIODE 2020-2022 KC MALANG	12
82	SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN PERIODE 2020-2022 KC SURABAYA	13
83	SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN PERIODE 2020-2022 KC SEMARANG	15

KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA
84	SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN PERIODE 2020-2022 KC BALARAJA	26
85	SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN PERIODE 2020-2022 KC DENPASAR	16
86	WEBINAR IDENTIFIKASI PERMASALAHAN HUKUM DAN MITIGASINYA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA MASA NEW NORMAL	3
87	ENABLING ORGANIZATION WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DURING MARKET TRANSITIONS	1
88	WEBINAR TALENT MANAGEMENT ECCELERATING BUSINESS PERFORMANCE - HR FORUM	5
89	SEMINAR NASIONAL KICK OF BUSINESS 2021	46
90	TRAINING MICROSOFT EXCEL BASIC BATCH 1	34
91	TRAINING MICROSOFT EXCEL BASIC BATCH 2	46
92	SOSIALISASI ASURANSI SINARMAS BATCH 1	261
93	SOSIALISASI ASURANSI SINARMAS BATCH 2	163
94	SOSIALISASI ASURANSI SINARMAS BATCH 3	235
95	PELATIHAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTRI ATR NO. 9 TAHUN 2019	1
96	STEP BY STEP SUSTAINABLE REPORTING FOR CORPORATE SECRETARY	1
97	TRAINING STRATEGIC LEARNING AND DEVELOPMENT SESUDAH PANDEMI	6
98	PELATIHAN SAMSAT	7
99	GATHERING ASBANDA	1
100	WEBINAR INTERNAL COMMUNICATION ENGAGEMENT	2
TOTAL		2574

Pelayanan Prima bagi Nasabah

Salah satu pemangku kepentingan yang utama bagi Perseroan adalah nasabah. Keberadaan dan kepuasan nasabah akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan kinerja Bank. Pelayanan nasabah menjadi fokus utama Perseroan dalam menjalankan usahanya. Perseroan juga berkomitmen untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang yang terbaik

kepada para nasabah. Untuk tujuan itu, upaya yang dilakukan Perseroan antara lain, memberikan pelayanan prima kepada semua nasabah sehingga kepercayaan mereka tetap terjaga, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Dalam memberikan layanan, Perseroan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan memperlakukan semua nasabah secara setara. [103-1]

KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

Dalam memberikan pelayanan prima, Perseroan mengedepankan beberapa aspek pelayanan sebagai berikut:

1. Memberikan jasa dan layanan perbankan yang bervariasi dan memenuhi kebutuhan nasabah dengan fitur-fitur yang menarik.
2. Memberikan penjelasan yang akurat dan terpercaya atas produk-produk keuangan yang ditawarkan melalui situs resmi Bank www.bankbanten.co.id
3. Menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui survei kepuasan nasabah yang dilakukan secara berkala.
4. Menjaga kepercayaan nasabah dengan memberikan perlindungan nasabah –termasuk menjaga kerahasiaan data.
5. Menyediakan saluran/akses pengaduan dan memberikan solusi segera.

Saluran dan Mekanisme Pengaduan

Perseroan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan Perseroan. Informasi mengenai produk dan layanan tersebut disediakan melalui berbagai media, antara lain:



Website

Perseroan menyediakan website yang beralamat www.bankbanten.co.id. Dalam situs web tersebut, Perseroan mencantumkan informasi lengkap produk dan jasa, pelaporan, dan informasi lain yang relevan.



Call Center 1500410

Perseroan menyediakan layanan call center pada nomor telepon 1500410 untuk berinteraksi yang dapat diakses selama 24 jam.



Customer Service

Pada setiap kantor layanan perbankan, Perseroan menyediakan layanan *customer service* yang akan memberikan berbagai informasi mengenai produk dan layanan yang diberikan Bank.

Penyediaan saluran pengaduan merupakan salah satu cara dan bentuk pelayanan Perseroan kepada nasabah. Dengan saluran yang ada, mereka bisa menyampaikan keluhan atau pengaduan yang dialaminya sehingga diperoleh solusi terbaik secepatnya.

Privasi dan Perlindungan Nasabah

Salah satu kunci utama dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabah adalah dengan menjaga kepercayaan nasabah melalui penjagaan privasi pelanggan dan memberikan perlindungan terhadap data-data pelanggan. Perseroan berkomitmen melindungi informasi dan keterangan mengenai nasabah, sebagai bentuk kepatuhan atas ketentuan-ketentuan:

- UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Surat Edaran OJK No.14/ SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen

Untuk mengikuti perkembangan teknologi, Perseroan berusaha memberikan fitur-fitur layanan digital yang memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan. Dengan digitalisasi, Perseroan dapat berperan aktif dalam program inklusi keuangan. Namun demikian, digitalisasi ini membuka eksposur risiko Bank terhadap kerawanan kebocoran data dan pelanggaran privasi pelanggan. Risiko terhadap pelanggaran privasi pelanggan dan kebocoran data pelanggan muncul salah satunya dari risiko siber yang berasal dari produk-produk digital yang dimiliki oleh Perseroan. Beberapa risiko siber yang mungkin muncul diantaranya adalah pencurian/kehilangan/penyalahgunaan/pengungkapan data informasi pelanggan. Untuk meminimalisir risiko tersebut, Perseroan melakukan berbagai inisiatif untuk memberikan perlindungan terhadap keamanan data nasabah. Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak mendapati adanya aduan dari masyarakat atau Lembaga mengenai kebocoran data pelanggan Bank. [103-3, 418-1]

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP GRI STANDARDS – OPSI INTI [102-55]

Aspek Material atau Pengungkapan Umum	GRI Standar	Indeks yang dilaporkan	Pengungkapan	Halaman
PENGUNGKAPAN UMUM				
PROFIL ORGANISASI	GRI 102: Pengungkapan Umum	102-1	Nama perusahaan	32
		102-2	Kegiatan, Merek, produk, dan jasa	37
		102-3	Lokasi kantor pusat	32
		102-4	Lokasi operasi	32
		102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum	32
		102-6	Pasar yang dilayani	40
		102-7	Skala organisasi	40
		102-8	Informasi mengenai karyawan	45
		102-9	Rantai pasokan	44
		102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya	N/A
		102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan	N/A
		102-12	Inisiatif eksternal	N/A
		102-13	Keanggotaan asosiasi	47
		102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior	N/A
STRATEGI	GRI 102: Pengungkapan Umum	102-15	Dampak utama, risiko, dan peluang	N/A
ETIKA DAN INTEGRITAS	GRI 102: Pengungkapan Umum	102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku	N/A
		102-17	Mekanisme untuk saran dan kekhawatiran tentang etika	N/A
TATA KELOLA	GRI 102: Pengungkapan Umum	102-18	Struktur tata kelola	50
		102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya	50
		102-25	Konflik kepentingan	59
		102-30	Keefektifan proses manajemen risiko	56
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	GRI 102: Pengungkapan Umum	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan	29
		102-41	Perjanjian perundingan kolektif	n/a
		102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan	29
		102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan	29
		102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan	29
		102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi	22
		102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topik	24
		102-47	Daftar topik material	24
PRAKTIK PELAPORAN	GRI 102: Pengungkapan Umum	102-48	Penyajian kembali informasi	22
		102-49	Perubahan dalam pelaporan	22
		102-50	Periode pelaporan	22
		102-51	Tanggal laporan terbaru	22
		102-52	Siklus pelaporan	22
		102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan	25
		102-54	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan Standar GRI	22
		102-55	Indeks isi GRI	22
		102-56	Assurance oleh pihak eksternal	25

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP GRI STANDARDS – OPSI INTI [102-55]

Aspek Material atau Pengungkapan Umum	GRI Standar	Indeks yang dilaporkan	Pengungkapan	Halaman
TOPIK EKONOMI				
KINERJA EKONOMI	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	23, 24, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 79, 83
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 79
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	23, 63, 65, 66, 70, 77, 78, 79, 85
	GRI 201: Kinerja Ekonomi	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	63, 64
		201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	66
		201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	66
KEBERADAAN PASAR	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	23, 24, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 79, 83
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 79
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	23, 63, 65, 66, 70, 77, 78, 79, 85
	GRI 202: Keberadaan Pasar	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	66
		202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	N/A
DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	23, 24, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 79, 83
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 79
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	23, 63, 65, 66, 70, 77, 78, 79, 85
	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	67
		203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	67
PRAKTIK PENGADAAN	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	N/A
	GRI 204: Praktik Pengadaan	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal	N/A
ANTIKORUPSI	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	N/A
	GRI 205: Anti Korupsi	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	N/A
PERILAKU ANTI-PERSAINGAN	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	N/A
	GRI 206: Perilaku Anti-Persaingan	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli	N/A

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP GRI STANDARDS – OPSI INTI [102-55]

Aspek Material atau Pengungkapan Umum	GRI Standar	Indeks yang dilaporkan	Pengungkapan	Halaman
TOPIK LINGKUNGAN				
ENERGI	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	70
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	70
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	70
	GRI 302: Energi	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	71
		302-3	Intensitas energi	71
		302-4	Pengurangan konsumsi energi Reduction in energy consumption	71
		302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	71
AIR DAN AIR LIMBAH	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	23, 24, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 79, 83
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 79
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	23, 63, 65, 66, 70, 77, 78, 79, 85
	GRI 303: Air dan Air Limbah	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	72
		303-2	Pengelolaan dampak terkait pembuangan air	71, 72
		303-2	Pengambilan Air	71, 72
303-3		Peepasan Air	71	
		303-4	Konsumsi Air	72
KEANEKARAGAMAN HAYATI	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	N/A
	GRI 304: Keanekaragaman Hayati	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	N/A
		304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	N/A
		304-4	Spesies Daftar Merah IUCN (Uni Internasional untuk Konservasi Alam) dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	N/A
EMISI	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	N/A
	GRI 305: Emisi	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	N/A
		305-2	Emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	N/A
		305-4	Intensitas emisi GRK	N/A
		305-5	Pengurangan emisi GRK	N/A
		305-6	Emisi bahan perusak ozon (BPO)	N/A
LIMBAH	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	72
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	72
	GRI 306: Limbah	306-1	Produksi limbah dan dampak signifikan terkait limbah	72
		306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah	72
		306-3	Limbah yang dihasilkan	72
306-4		Limbah dialihkan dari pembuangan	72	
306-5		Limbah diarahkan ke pembuangan	72	

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP GRI STANDARDS – OPSI INTI [102-55]

Aspek Material atau Pengungkapan Umum	GRI Standar	Indeks yang dilaporkan	Pengungkapan	Halaman	
KEPATUHAN LINGKUNGAN	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	72	
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 79	
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	23, 63, 65, 66, 70, 77, 78, 79, 85	
	GRI 307: Kepatuhan Lingkungan	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	72	
	PENILAIAN ASPEK LINGKUNGAN TERHADAP PEMASOK	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
			103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A
103-3			Evaluasi pendekatan manajemen	N/A	
GRI 308: Penilaian Aspek Lingkungan terhadap Pemasok		308-1	Pemasok baru yang disaring menggunakan kriteria lingkungan	N/A	
		308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil	N/A	
TOPIK SOSIAL					
KEPEGAWAIAN EMPLOYMENT	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	76, 77, 78, 79	
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	76, 77, 78, 79	
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	76, 77, 78, 79	
	GRI 401: Kepegawaian	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	76, 77	
		401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	78	
		401-3	Cuti melahirkan	78	
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN LABOR/MANAGEMENT RELATIONS	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A	
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A	
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	N/A	
	GRI 402: Hubungan Ketenagakerjaan	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional	N/A	
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	78-79	
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	78-79	
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	78-79	
	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja	403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	78-79	
		403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	78-79	
		403-3	Pelayanan kesehatan kerja	78-79	
		403-4	Partisipasi pekerja, konsultasi, dan komunikasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja	78-79	
		403-5	Pelatihan pekerja tentang kesehatan dan keselamatan	78-79	
		403-8	Pekerja yang dilindungi oleh sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	78-79	
		403-9	Cedera terkait pekerjaan	78-79	
403-10	Kesehatan yang buruk terkait pekerjaan	78-79			

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP GRI STANDARDS – OPSI INTI [102-55]

Aspek Material atau Pengungkapan Umum	GRI Standar	Indeks yang dilaporkan	Pengungkapan	Halaman
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	79
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	79
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	79
	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	79
		404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	79-83
	KEBERAGAMAN DAN KESEMPATAN YANG SETARA	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya
103-2			Pendekatan manajemen dan komponennya	63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 79
103-3			Evaluasi pendekatan manajemen	23, 63, 65, 66, 70, 77, 78, 79, 85
GRI 405: Keberagaman dan Kesempatan yang Setara		405-1	Keragaman badan tata kelola dan karyawan	77
		405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki	77
NON DISKRIMINASI		GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya
	103-2		Pendekatan manajemen dan komponennya	23, 63, 65, 66, 70, 77, 78, 79, 85
	103-3		Evaluasi pendekatan manajemen	77
	GRI 406: Non Diskriminasi	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	N/A
	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A
103-3		Evaluasi pendekatan manajemen	N/A	
KEBEBASAN BERASOSIASI DAN BERSERIKAT	GRI 407: Kebebasan Berasosiasi dan Berserikat	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama mungkin terancam	N/A
PEKERJA ANAK	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	N/A
	GRI 408: Pekerja Anak	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	N/A
PEKERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	N/A
	GRI 409: Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	409-1	Operasi dan pemasok berisiko signifikan untuk insiden kerja paksa atau wajib kerja	N/A

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP GRI STANDARDS – OPSI INTI [102-55]

Aspek Material atau Pengungkapan Umum	GRI Standar	Indeks yang dilaporkan	Pengungkapan	Halaman
HAK MASYARAKAT ADAT	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	N/A
	GRI 411: Hak Masyarakat Adat	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak masyarakat adat	N/A
MASYARAKAT LOKAL	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	N/A
	GRI 413: Masyarakat Lokal	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal	N/A
		413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	N/A
PENILAIAN ASPEK SOSIAL TERHADAP PEMASOK	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	N/A
	GRI 414: Penilaian Aspek Sosial terhadap Pemasok	414-1	Pemasok baru yang disaring menggunakan kriteria sosial	N/A
		414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil	N/A
PEMASARAN DAN PELABELAN	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	N/A
	GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	N/A
		417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	85
PRIVASI PELANGGAN	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	85
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	85
	GRI 418: Privasi Pelanggan	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	85
KEPATUHAN SOSIAL EKONOMI	GRI 103: Pendekatan Manajemen	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya	N/A
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya	N/A
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen	N/A
	GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	85

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP POJK NO.51 /POJK.03/2017

No	Pengungkapan	Indikator	Halaman
1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	[1]	12
2	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan		
a.	Aspek Ekonomi/ Economic aspects:	[2.a]	2,3
	1) kuantitas produksi atau jasa yang dijual;	[2.a.1]	2
	2) pendapatan atau penjualan;	[2.a.2]	2
	3) laba atau rugi bersih;	[2.a.3]	2
	4) produk ramah lingkungan; dan	[2.a.4]	2
	5) pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.	[2.a.5]	2
b.	Aspek Lingkungan Hidup		
	1) penggunaan energi (antara lain listrik dan air);	[2.b.1]	3
	2) pengurangan emisi yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup);	[2.b.2]	3
	3) pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup); atau	[2.b.3]	3
	4) pelestarian keanekaragaman hayati (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup).	[2.b.4]	3
c.	Aspek Sosial: Uraian mengenai dampak positif dan negatif penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana). Social Aspects:		2
3	Profil Singkat Perusahaan:		
a.	visi, misi, dan nilai keberlanjutan	[3.a]	35
b.	nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs/web, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan	[3.b]	32
c.	skala usaha:		
	1) total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	[3.c.1]	32
	2) jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan;	[3.c.2]	32
	3) persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan	[3.c.3]	32
	4) wilayah operasional.	[3.c.4]	38-39
d.	penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;	[3.d]	37
e.	keanggotaan pada asosiasi;	[3.e]	47
f.	perubahan yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.	[3.f]	N/A
4.	Penjelasan Direksi memuat:		
a.	Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi:		
	1) penjelasan nilai keberlanjutan Perusahaan	[4.a.1]	12
	2) penjelasan respons Perusahaan terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;	[4.a.2]	12
	3) penjelasan komitmen pimpinan Perusahaan dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;	[4.a.3]	12
	4) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan	[4.a.4]	13
	5) tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.	[4.a.5]	14
b.	Penerapan Keuangan Berkelanjutan :		
	1) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) dibandingkan dengan target; dan		15-18
	2) penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).		15-18

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP POJK NO.51 /POJK.03/2017

No	Pengungkapan	Indikator	Halaman
c. Strategi pencapaian target :			
	1) pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;		15-18
	2) pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan		15-18
	3) penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan Perusahaan		15-18
5 Tata kelola keberlanjutan memuat			
a.	Uraian tugas Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan		52-53
b.	Pengembangan kompetensi Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.		54-55
c.	Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko Perusahaan.		56
d.	Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi		
	1) keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen.		59
	2) pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan.		59
e.	Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.		57
6 Kinerja keberlanjutan:			
a.	Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di Perusahaan		62
b.	Uraian mengenai kinerja ekonomi:		
	1) perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi		63
	2) perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.		63
	Kinerja sosial:		
	1) Komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen.		70
	2) Ketenagakerjaan:		
	a) Kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak;		77
	b) Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional;		77
	c) Lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan		78
	d) Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.		79
	3) Masyarakat:		
	a) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat, sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan;		66-67
	b) mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan		66-67
	c) TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat		66-67
d.	Kinerja Lingkungan Hidup:		
	1) biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan;		70-72
	2) uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan		70-72

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP POJK NO.51 /POJK.03/2017

No	Pengungkapan	Indikator	Halaman
3)	uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat:		
a)	jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan		70-72
b)	upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan;		70-72
e.	Kinerja Lingkungan Hidup bagi Perusahaan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup :		
1)	kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d;		70-72
2)	informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sekitar, terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem;		70-72
3)	keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat:		
a)	dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; dan		N/A
b)	usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna;		N/A
4)	emisi, paling sedikit memuat:		
a)	jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan		N/A
b)	upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan;		N/A
5)	limbah dan efluen, paling sedikit memuat:		
a)	jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis;		72
b)	mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; dan		72
c)	tumpahan yang terjadi (jika ada); dan		72
6)	jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan.		72
f.	Tanggung jawab pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan:		
1)	inovasi dan pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan;		N/A
2)	jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan;		N/A
3)	dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif;		N/A
4)	jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau		N/A
5)	survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.		N/A
7.	Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada...		N/A

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

SDG's	Tema Bisnis	Relevansi GRI Standard	GRI Index	Topik	Halaman	
1. TANPA KEMISKINAN  Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia	Penghasilan, upah, dan tunjangan	GRI 201: Kinerja Ekonomi	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	66	
		GRI 202: Keberadaan Pasar	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	66	
			202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	n/a	
		GRI 401: Kepegawaian	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu	78	
	Pembangunan ekonomi di wilayah kemiskinan tertinggi	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	67	
			203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	67	
	2. TANPA KELAPARAN  Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budaya pertanian yang berkelanjutan.	Perbaikan kesehatan di wilayah kemiskinan tertinggi	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	67
				203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	67
		Kinerja Ekonomi	GRI 201: Kinerja Ekonomi	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	63, 64
		Hak Masyarakat Adat	GRI 411: Hak Masyarakat Adat	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak masyarakat adat	N/A
Komunitas Lokal		GRI 413: Masyarakat Lokal	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	N/A	
Akses terhadap Obat-obatan		GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	67	
3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA  Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.	Kualitas Air	GRI 303: Air dan Air Limbah	303-2	Pengambilan Air	71, 72	
			303-3	Peepasan Air	71	
			303-4	Konsumsi Air	72	
	Kualitas udara	GRI 305: Emisi	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	N/A	
			305-2	Emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	N/A	
			305-5	Pengurangan emisi GRK	N/A	
			305-6	Emisi bahan perusak ozon (BPO)	N/A	
	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja	403-9	Cedera terkait pekerjaan	78-79	
			403-10	Kesehatan yang buruk terkait pekerjaan	78-79	
	Limbah	GRI 306: Limbah	306-3	Limbah yang dihasilkan	72	
306-4			Limbah dialihkan dari pembuangan	72		
306-5			Limbah diarahkan ke pembuangan	72		
Kepatuhan terhadap undang-undang	GRI 307: Kepatuhan Lingkungan	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	72		
	GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	N/A		

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

SDG's	Tema Bisnis	Relevansi GRI Standard	GRI Index	Topik	Halaman		
4. PENDIDIKAN BERKUALITAS 	Pelatihan dan Pendidikan	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan Programs to improve employee skills and transition assistance programs	79		
			404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	79-83		
Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang.	Komunitas Lokal	GRI 413: Masyarakat Lokal	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	N/A		
5. KESETRAAN 	Kesetaraan Pria dan Wanita	GRI 202: Keberadaan Pasar GRI 401: Kepegawaian GRI 405: Keberagaman dan Kesempatan yang Setara GRI 406: Non Diskriminasi	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	66		
			401-3	Cuti melahirkan	78		
			401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	76, 77		
			405-1	Keragaman badan tata kelola dan karyawan	77		
			405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki	77		
			406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan	77		
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.							
6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK 	Air dan Limbah	GRI 303: Air dan Air Limbah	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	72		
			303-2	Pengelolaan dampak terkait pembuangan air	71, 72		
			303-2	Pengambilan Air	71, 72		
			303-3	Peepasan Air	71		
			303-4	Konsumsi Air	72		
			306-3	Limbah yang dihasilkan	72		
			306-4	Limbah dialihkan dari pembuangan	72		
				GRI 306: Limbah			
			306-5	Limbah diarahkan ke pembuangan	72		
			Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang				

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

SDG's	Tema Bisnis	Relevansi GRI Standard	GRI Index	Topik	Halaman		
7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU 	Efisiensi energy dan energy terbarukan	GRI 302: Energi	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	71		
			302-3	Intensitas energi	71		
			302-4	Pengurangan konsumsi energi	71		
			302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	71		
			Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	67
8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 	Penghasilan, upah, dan tunjangan	GRI 202: Keberadaan Pasar	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	66		
			202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	N/A		
			Kepegawaian	GRI 401: Kepegawaian	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	76, 77
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu			78		
	401-3	Cuti melahirkan			78		
	Kepegawaian	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja	403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	78-79		
			403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	78-79		
			403-3	Pelayanan kesehatan kerja	78-79		
			403-8	Pekerja yang dilindungi oleh sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	78-79		
			403-9	Cedera terkait pekerjaan	78-79		
			403-10	Kesehatan yang buruk terkait pekerjaan	78-79		
			Pertumbuhan Ekonomi	GRI 201: Kinerja Ekonomi	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	63, 64
	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya			66		
	Indirect impact on job creation	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung			203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	67
	8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 	Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja	403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	78-79	
403-2				Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	78-79		
403-3				Pelayanan kesehatan kerja	78-79		
403-8				Pekerja yang dilindungi oleh sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja	78-79		
403-9				Cedera terkait pekerjaan	78-79		
403-10				Kesehatan yang buruk terkait pekerjaan	78-79		
Pertumbuhan Ekonomi				GRI 201: Kinerja Ekonomi	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	63, 64
201-3					Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	66	
Indirect impact on job creation					GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

SDG's	Tema Bisnis	Relevansi GRI Standard	GRI Index	Topik	Halaman	
10. BERKURANGNYA KESENJANGAN 	Pembangunan Infrastruktur di wilayah kemiskinan tertinggi	GRI 201: Kinerja Ekonomi	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	63, 64	
		GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	67	
			203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	67	
	Pengembangan ekonomi di daerah miskin	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	67	
			203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	67	
	Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara.	Kesetaraan	GRI 202: Keberadaan Pasar	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	66
				202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal	n/a
11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN 	Investasi Infrastruktur	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	67	
			Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan.			

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

SDG's	Tema Bisnis	Relevansi GRI Standard	GRI Index	Topik	Halaman
12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	Praktik pengadaan	GRI 204: Praktik Pengadaan	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal	N/A
			302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	71
	Efisiensi energi	GRI 302: Energi	302-3	Intensitas energi	71
			302-4	Pengurangan konsumsi energi	71
			302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	71
			303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	72
			303-2	Pengelolaan dampak terkait pembuangan air	71, 72
	Efisiensi Air	GRI 303: Air dan Air Limbah	303-2	Pengambilan Air	71, 72
			303-3	Peepasan Air	71
			303-4	Konsumsi Air	72
			305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	N/A
	Kualitas Udara	GRI 305: Emisi	305-2	Emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	N/A
			305-4	Intensitas emisi GRK	N/A
			305-5	Pengurangan emisi GRK	N/A
			305-6	Emisi bahan perusak ozon (BPO)	N/A
			306-1	Produksi limbah dan dampak signifikan terkait limbah	72
			306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah	72
Limbah	GRI 306: Limbah	306-3	Limbah yang dihasilkan	72	
		306-4	Limbah dialihkan dari pembuangan	72	
		306-5	Limbah diarahkan ke pembuangan	72	
		417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa	N/A	
		417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran	N/A	
13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM	Efisiensi Energi	GRI 302: Energi	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	71
			302-3	Intensitas energi	71
			302-4	Pengurangan konsumsi energi	71
			302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa	71
			Kualitas Udara	GRI 305: Emisi	305-1
	305-2	Emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung			N/A
	305-4	Intensitas emisi GRK			N/A
	305-5	Pengurangan emisi GRK			N/A
	305-6	Emisi bahan perusak ozon (BPO)			N/A
	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup			72
	Kepatuhan Lingkungan	GRI 307: Kepatuhan Lingkungan			

Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

SDG's	Tema Bisnis	Relevansi GRI Standard	GRI Index	Topik	Halaman		
14. EKOSISTEM LAUTAN  Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.	Air dan Limbah Air	GRI 303: Air dan Air Limbah	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	72		
			303-2	Pengelolaan dampak terkait pembuangan air	71,72		
			303-2	Pengambilan Air	71,72		
			303-3	Peepasan Air	71		
			303-4	Konsumsi Air	N/A		
	Keanekaragaman Hayati	GRI 304: Keanekaragaman Hayati	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	N/A		
			304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	N/A		
			304-4	Spesies Daftar Merah IUCN (Uni Internasional untuk Konservasi Alam) dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	N/A		
			305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	N/A		
			305-2	Emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	N/A		
15. EKOSISTEM DARATAN  Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah.	Emisi	GRI 305: Emisi	305-4	Intensitas emisi GRK	N/A		
			305-5	Pengurangan emisi GRK	N/A		
			305-6	Emisi bahan perusak ozon (BPO)	N/A		
			Limbah	GRI 306: Limbah	306-1	Produksi limbah dan dampak signifikan terkait limbah	N/A
					306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah	72
	306-3	Limbah yang dihasilkan			N/A		
	306-4	Limbah dialihkan dari pembuangan			N/A		
	306-5	Limbah diarahkan ke pembuangan			N/A		
	Keanekaragaman Hayati	GRI 304: Keanekaragaman Hayati	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	N/A		
			304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	N/A		
304-4			Spesies Daftar Merah IUCN (Uni Internasional untuk Konservasi Alam) dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	N/A			

INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

SDG's	Tema Bisnis	Relevansi GRI Standard	GRI Index	Topik	Halaman
16. PERDAMAIAN, KEADILAN, KELEMBAGAAN YANG TANGGUH  Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.	Anti Korupsi	GRI 205: Anti Korupsi	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	N/A
	Kesetaraan	GRI 405: Keberagaman dan Kesempatan yang Setara	405-1	Keragaman badan tata kelola dan karyawan	77
			405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki	77
	Penghapusan pekerja anak dan pekerja paksa	GRI 408: Pekerja Anak GRI 409: Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	N/A
			409-1	Operasi dan pemasok berisiko signifikan untuk insiden kerja paksa atau wajib kerja	72
	Kepatuhan	GRI 307: Kepatuhan Lingkungan GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup	N/A
			419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi	N/A
17. KEMITRAAN UNTUK TUJUAN  Memperkuat perangkat-perangkat Implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Inisiatif eksternal	GRI 102: Pengungkapan Umum	102-12	Inisiatif Eksternal	N/A
			413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal	N/A
	Masyarakat Lokal	GRI 413: Masyarakat Lokal	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal	N/A

LEMBAR UMPAN BALIK

Kami mohon kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini dengan mengirim email atau mengirim formulir ini melalui fax/pos.

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai

1. Laporan ini menarik dan mudah dimengerti
 Tidak setuju Netral Setuju

2. Laporan ini sudah menggambarkan kinerja Bank dalam pembangunan keberlanjutan
 Tidak setuju Netral Setuju

3. Laporan ini meningkatkan kepercayaan Anda pada keberlanjutan Bank
 Tidak setuju Netral Setuju

4. Topik material apa yang paling penting bagi Anda: (nilai 1=paling penting s/d 4=paling tidak penting)
 - Ekonomi Kinerja ()
 - Anti-korupsi ()
 - Produk Portofolio ()
 - Energi ()
 - Privasi Pelanggan ()
 - Keuangan Literasi ()
 - Pelatihan dan Pendidikan ()

5. Mohon berikan saran/usul/komentar anda atas laporan ini.

Profil Anda

Nama : _____

Pekerjaan : _____

Nama Lembaga/Perusahaan : _____

Golongan Pemangku Kepentingan : _____

Pemerintah Perusahaan Masyarakat
 Industri LSM Lainnya

Mohon kirimkan Kembali lembar upan balik kepada:

Divisi Sekretaris Perusahaan

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
 Jl. Jenderal Sudirman Kemang Ruko Sembilan No, 4, 5, dan 6
 Kota Serang - Banten, Indonesia
 Telp.: +62 254 7917346
 Email: corporate.secretary@bankbanten.co.id
 Website: www.bankbanten.co.id



PT Bank Daerah Pembangunan Banten Tbk

Kantor Pusat Non Operasional:

Jl. Jenderal Sudirman Lingkungan Kemang
Ruko Sembilan No. 04, 05 & 06
Kelurahan Sumur Pecung, Serang, Banten

 (0254) 7917346

 www.bankbanten.co.id